



BERITA ACARA SIDANG PENDADARAN TUGAS AKHIR

S/UBL/FISIP/0210/II/25

Pada hari ini, Selasa 04 Februari 2025 telah dilaksanakan Ujian Sidang Pendadaran Tugas Akhir sebagai berikut:

Judul : UPAYA KERJASAMA INDONESIA DAN KAMBOJA DALAM SEKTOR PARIWISATA 2022 - 2024

Nama : Muhammad Ehsan

NIM : 2042500526

Dosen Pembimbing : Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si

Berdasarkan penilaian pada Presentasi, Penulisan + Metodologi, Penguasaan Materi maka Mahasiswa tersebut di atas dinyatakan:

LULUS

dengan nilai angka: 71 huruf: B

Mahasiswa tersebut di atas wajib menyerahkan hasil perbaikan tulisan Tugas Akhir dalam bentuk terjilid sesuai dengan Panduan Perbaikan Tugas Akhir, selambat-lambatnya Senin 03 Maret 2025.

Panitia Pengaji:

1. Ketua Dr. Denada Faraswacyen L. Gaol, M.Si
2. Anggota Syahrul Awal, S.I.P, M.Si
3. Moderator Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si

Keterangan:

Nilai Huruf: A:85-100 A-:80-84,99 B+:75-79,99 B:70-74,99 B-:65-69,99 C:60-64,99 D:40-59,99 E-:0-39,99

**UPAYA KERJASAMA INDONESIA DAN KAMBOJA DALAM SEKTOR
PARIWISATA 2022 - 2024**

SKRIPSI



Oleh :
Muhammad Ehsan
2042500526

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
2024/2025**

**UPAYA KERJASAMA INDONESIA DAN KAMBOJA DALAM SEKTOR
PARIWISATA TAHUN 2022 - 2024.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

**Strata Satu (S-1) Sarjana Hubungan Internasional (S.Hub.Int.) Dalam
Program Studi Hubungan Internasional**



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD EHSAN

2042500526

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
2024/2025**



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ehsan
NIM : 2042500526
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Studi Global

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**“UPAYA KERJASAMA INDONESIA DAN KAMBOJA DALAM SEKTOR
PARIWISATA TAHUN 2022 - 2024.”**

1. Merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk meperoleh gelar akademik oleh pihak lain,
2. Saya izinkan untuk dikelola oleh Universitas Budi Luhur sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima kosekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 27, Januari 2025

Muhammad Ehsan



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Muhammad Ehsan
Nomor Induk Mahasiswa : 2042500526
Program Studi : Hubungan Internasional
Bidang Peminatan :
Jenjang Studi : Strata 1
Judul : UPAYA KERJASAMA INDONESIA DAN KAMBOJA DALAM SEKTOR
PARIWISATA 2022 - 2024



Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui, disahkan dan direkam secara elektronik sehingga tidak memerlukan tanda tangan tim penguji.

Jakarta, Selasa 04 Februari 2025

Tim Penguji:

Ketua : Dr. Denada Faraswacyen L. Gaol, M.Si
Anggota : Syahrul Awal, S.I.P, M.Si
Pembimbing : Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si
Ketua Program Studi : Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis upaya kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam sektor pariwisata pada periode 2022–2024. Dengan menggunakan pendekatan teori liberalisme, penelitian ini menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat hubungan bilateral melalui sektor pariwisata. Konsep pariwisata digunakan untuk memahami dinamika industri pariwisata, termasuk kebijakan, strategi pemasaran, serta peran aktor negara dan non-negara dalam memfasilitasi kerja sama ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji kebijakan, perjanjian bilateral, serta inisiatif yang telah dilakukan oleh kedua negara dalam mendorong peningkatan jumlah wisatawan, investasi pariwisata, dan penguatan infrastruktur pariwisata. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia dan Kamboja dalam sektor pariwisata mencakup berbagai aspek, seperti promosi bersama, peningkatan koneksi transportasi, serta pertukaran budaya dan sumber daya manusia. Meskipun terdapat tantangan, seperti perbedaan regulasi dan dampak pandemi COVID-19, kerja sama ini tetap menunjukkan perkembangan positif yang sejalan dengan prinsip liberalisme, yaitu saling ketergantungan dan keuntungan bersama. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif dalam sektor pariwisata dapat menjadi instrumen diplomasi ekonomi yang efektif bagi kedua negara.

Kata Kunci: Indonesia, Kamboja, kerja sama pariwisata, liberalisme, penelitian kualitatif



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

ABSTRACT

This study analyzes the cooperation efforts between Indonesia and Cambodia in the tourism sector during the 2022–2024 period. Using the liberalism theory, this research highlights the importance of intergovernmental collaboration in fostering economic growth and strengthening bilateral relations through tourism. The concept of tourism is applied to understand the dynamics of the tourism industry, including policies, marketing strategies, and the role of state and non-state actors in facilitating this cooperation. This study employs a qualitative method with a descriptive approach to examine policies, bilateral agreements, and initiatives undertaken by both countries to increase tourist arrivals, tourism investments, and infrastructure development. Data were collected through literature reviews, analysis of official documents, and interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that Indonesia and Cambodia's tourism cooperation encompasses various aspects, such as joint promotions, improved transportation connectivity, and cultural and human resource exchanges. Despite challenges such as regulatory differences and the impact of the COVID-19 pandemic, this cooperation continues to show positive developments aligned with the principles of liberalism, namely interdependence and mutual benefits. Therefore, this research affirms that a collaborative approach in the tourism sector can serve as an effective economic diplomacy instrument for both countries.

Keywords: *Indonesia, Cambodia, tourism cooperation, liberalism, qualitative research*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Upaya Kerja Sama Indonesia dan Kamboja dalam Sektor Pariwisata 2022–2024**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam sektor pariwisata, termasuk kebijakan bilateral, strategi promosi wisata, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam hubungan internasional, dan kerja sama antara kedua negara diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan serta memperkuat ikatan ekonomi dan budaya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta peluang pengembangan lebih lanjut dalam sektor ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilannya tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga tercinta yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan moral dan material yang tiada henti. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang tertarik dalam bidang hubungan internasional dan pengembangan pariwisata. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Muhammad Ehsan

LEMBAR PERSEMPAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan Rahmat serta kemudahan bagi penulis dalam penggerjaan Skripsi ini,
2. Kepada Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan support serta doanya dalam proses penggerjaan Skripsi ini,
3. Kepada Keluarga Besar yang selalu memberikan support kepada penulis dalam penggerjaan Skripsi ini,
4. Bapak Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc, selaku Rektor Universitas Budi Luhur,
5. Bapak Dr. Yusran, S.I.P, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global,
6. Ibu Anggun Puspitasari, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
7. Ibu Anggun Puspitasari, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini,
8. Kepada Abdul Basit, S.I.P, selaku senior, mentor dan menjadi sosok saudara yang selalu mengayomi selama di perantauan.
9. Kepada rekan rekan seperantauan yang selalu menemani di masa perkuliahan.
10. Kepada Organisasi HIMAHI Budi Luhur yang telah memberikan pengalaman yang tak terlupakan.

Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix
BAB I	ix
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Kerangka Pemikiran	5
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II	11
PARIWISATA DI INDONESIA	11
2.1 Potensi Pariwisata Indonesia	12
2.2 Permasalahan Pariwisata di Indonesia	13
BAB III	21
KERJASAMA INDONESIA-KAMBOJA	21
3.1 Peran Indonesia dalam Penyelesaian Perdagangan Manusia di Kamboja	22
3.2 Indonesia Sebagai Penengah Konflik Kamboja dan Thailand	26
BAB IV	34
UPAYA KERJA SAMA INDONESIA-KAMBOJA DALAM PARIWISATA TAHUN 2022–2024	34
4.1. Implementasi MoU Kerja Sama Pariwisata	34
4.2. Upaya dan Inisiatif Kerja Sama	35
4.3. Tantangan dalam Implementasi Kerja Sama	36
4.4.1. Peningkatan Jumlah Wisatawan	36
4.5. Analisis Kerja Sama Indonesia-Kamboja dalam Pariwisata dengan Pendekatan Liberalisme	39
BAB V	42
KESIMPULAN	42
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pariwisata adalah industri yang berkembang pesat di seluruh dunia yang melibatkan perjalanan dan kunjungan wisatawan ke berbagai tujuan untuk tujuan rekreasi, bisnis, budaya, atau pendidikan. Pariwisata memiliki dampak ekonomi yang signifikan dan dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan pertukaran budaya antar negara. Pariwisata juga merupakan isu penting dalam konteks ilmu hubungan internasional. Meskipun mungkin tidak selalu menjadi fokus utama, pariwisata memiliki dampak besar pada hubungan internasional dan geopolitik, serta memainkan peran dalam berbagai isu dalam diplomasi internasional.¹

Pariwisata Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi negara, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap pemasukan devisa. Namun, peningkatan pariwisata juga dapat menyebabkan dampak negatif, seperti inflasi, kenaikan harga, tekanan tambahan pada penduduk lokal, dan gangguan lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif ini, penting untuk mengadopsi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta untuk meminimalkan dampak negatif lainnya. Dengan beragam destinasi alam dan budaya yang menarik.²

Salah satu sektor ekonomi Indonesia yang memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar adalah pariwisata. Indonesia memiliki banyak tempat yang menarik untuk dilihat, mulai dari keindahan alam, keanekaragaman budaya, hingga petualangan yang menarik. Keanekaragaman budaya juga menarik wisatawan. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi, bahasa, pakaian, tarian, dan seni yang berbeda. Daya tarik budaya Indonesia termasuk festival budaya seperti Upacara Bali, Festival Keraton di Yogyakarta, dan perayaan hari besar etnis. Meskipun

¹ "Perkembangan Pariwisata Dunia - Direktori File UPI." http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/LIGA SURYADANA/Perkembangan_Pariwisata_Dunia.pdf. Diakses pada 14 Des. 2023.

² "Dampak Pariwisata Pada Perekonomian - Fakultas Ekonomi dan" 15 Mei. 2023, <https://feb.umsu.ac.id/dampak-pariwisata-pada-perekonomian/>. Diakses pada 14 Des. 2023.

potensi pariwisata Indonesia sangat besar, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Ini termasuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik, peningkatan layanan dan aksesibilitas bagi wisatawan, dan infrastruktur yang belum merata di beberapa wilayah. Pemerintah terus meningkatkan infrastruktur, mengembangkan destinasi wisata yang lebih beragam, dan meningkatkan layanan.³

Sektor pariwisata memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2023, pariwisata menyumbang sekitar 3,9% terhadap PDB nasional, dengan nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp1.414,77 triliun. Selain itu, sektor ini menyerap hampir 50 juta tenaga kerja, yang terdiri dari 24,41 juta di bidang pariwisata dan 24,92 juta di sektor ekonomi kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat luas.

Pandemi COVID-19 sempat memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata, menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah wisatawan dan pendapatan devisa. Namun, sejak tahun 2022, sektor ini mulai menunjukkan pemulihan yang positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat drastis hingga mencapai 5,47 juta orang, atau naik sebesar 251,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata juga meningkat menjadi US\$4,26 miliar pada tahun yang sama. Tren pemulihan ini menunjukkan bahwa pariwisata memiliki daya tahan tinggi dan mampu kembali menjadi salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional.

Dengan potensi yang besar, pengembangan pariwisata di Indonesia terus didorong melalui berbagai kebijakan dan inovasi. Pemerintah berupaya meningkatkan infrastruktur, promosi wisata, serta mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang berkaitan erat dengan pariwisata. Selain itu, peningkatan kualitas destinasi wisata dan keberlanjutan lingkungan juga menjadi fokus utama agar sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, pariwisata diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di dunia.

³ "Jurnal Pariwisata Indonesia." 30 Jun. 2023, <https://jurnal.stpsahidsurakarta.ac.id/>. Diakses pada 16 Des. 2023.

Indonesia dan Kamboja telah lama bekerja sama di bidang pariwisata melalui hubungan bilateral dan organisasi ASEAN. Untuk memperkuat kerja sama di sektor ini dan mempercepat pemulihan industri pasca pandemi, kedua negara telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Pariwisata. Kedua negara telah bekerja sama untuk mempromosikan pariwisata bersama, mengelola destinasi, dan membangun infrastruktur. Mereka juga telah bekerja sama untuk mengembangkan produk pariwisata yang lebih berkelanjutan dan menarik, serta untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang pengelolaan destinasi. Salah satu tujuan kerja sama ini adalah untuk mendorong pengembangan situs warisan budaya UNESCO seperti Angkor Wat di Kamboja dan Candi Borobudur di Indonesia. Indonesia telah berpartisipasi dalam Forum Pariwisata ASEAN (ATF) untuk membantu Kamboja meningkatkan industri pariwisatanya.⁴ Untuk mempercepat pemulihan industri pariwisata pasca pandemi, Indonesia dan Kamboja telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Pariwisata. Kedua negara telah bekerja sama untuk mempromosikan pariwisata bersama, mengelola destinasi, dan membangun infrastruktur. Mereka juga telah bekerja sama untuk mengembangkan produk pariwisata yang lebih berkelanjutan dan menarik, serta untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang pengelolaan destinasi. Salah satu tujuan kerja sama ini adalah untuk mendorong pengembangan situs warisan budaya UNESCO seperti Angkor Wat di Kamboja dan Candi Borobudur di Indonesia. Indonesia telah berpartisipasi dalam Forum Pariwisata ASEAN (ATF) untuk membantu Kamboja meningkatkan industri pariwisatanya.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata Kamboja telah meningkat pesat. Negara ini memiliki banyak warisan sejarah, terutama kompleks kuil Angkor yang megah. Kamboja adalah tempat yang menarik untuk turis karena Kuil Angkor, yang merupakan salah satu situs arkeologi terbesar di dunia. Angkor Wat, simbol nasional Kamboja, menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Kamboja juga memiliki banyak kuil dan kompleks arkeologi lain, seperti Angkor Thom, Ta Prohm,

⁴ "Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Phnom Penh ... - Kemlu." 6 Agu. 2023, <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/read/press-release-the-14th-indonesian-trade-and-tourism-promotion-itp-strengthening-cooperation-through-collaboration-phnom-penh-4-6-august-2023/1561/important-information>. Diakses pada 17 Des. 2023.

⁵ "Indonesia And Cambodia Agree To Awakening Post Pandemic" 27 Jun. 2022, <https://kemlu.go.id/portal/en/read/3730/berita/indonesia-and-cambodia-agree-to-awakening-post-pandemic-tourism>. Diakses pada 18 Des. 2023.

dan Preah Khan. Pemerintah Kamboja telah berusaha untuk meningkatkan sektor pariwisatanya dengan memperbaiki infrastruktur, mengembangkan fasilitas, dan meningkatkan layanan dan fasilitas, serta masalah kebersihan dan lingkungan di beberapa tempat wisata.⁶

Tujuan kerja sama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja adalah untuk menarik lebih banyak wisatawan ke kedua negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan devisa masing-masing negara. Dengan kerja sama dalam promosi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata, Kamboja dapat menarik lebih banyak wisatawan dari Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan devisa dan sektor pariwisata Kamboja. Namun, dampak kerja sama ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati.⁷ Kontribusi pariwisata terhadap PDB: Sektor pariwisata telah berkontribusi secara signifikan terhadap PDB Indonesia, menyumbang 5,0% PDB pada tahun 2019, tetapi karena krisis COVID-19, kontribusinya menurun menjadi 2,3% pada tahun 2021. Penciptaan Lapangan Kerja: Pariwisata telah menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia. Pendapatan Devisa: Pariwisata telah menjadi sumber devisa penting bagi Indonesia, menghasilkan \$10,46 miliar pada tahun 2023.⁸

Sejak tahun 1999, Indonesia dan Kamboja telah bekerja sama dalam bidang pariwisata. Perjanjian ini mencakup upaya untuk mempromosikan atraksi wisata masing-masing negara, termasuk tempat wisata legendaris seperti Candi Borobudur di Indonesia dan Angkor Wat di Kamboja. Berbagai nota kesepahaman dan nota kerja sama telah dibuat untuk memperbarui dan memperkuat kerja sama ini dalam berbagai hal seperti promosi pariwisata, pengelolaan destinasi, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan produk pariwisata yang berkelanjutan.⁹

Sejak awal tahun 2022, Indonesia dan Kamboja telah melakukan lebih banyak kerja sama di bidang pariwisata dengan menandatangani Memorandum

⁶ "Kerjasama Indonesia-Kamboja dalam sektor pariwisata melalui" 30 Okt. 2022, <http://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/view/2685>. Diakses pada 17 Des. 2023.

⁷ "Indonesia – Kamboja Sepakati Kerja Sama Pariwisata untuk" 21 Jan. 2022, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/indonesia-kamboja-sepakati-kerja-sama-pariwisata-untuk-percepat-pemulihhan-ekonomi>. Diakses pada 18 Des. 2023.

⁸ "Indonesia: tourism as share of GDP - Statista." 21 Nov. 2023, <https://www.statista.com/statistics/1150613/indonesia-tourism-gdp-direct-contribution-share/>. Diakses pada 18 Des. 2023.

⁹ "42 BAB IV PEMBENTUKAN KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA" <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12083/8.BAB%20IV.pdf?isAllowed=y&sequence=8>. Diakses pada 18 Des. 2023.

Saling Pemahaman, juga dikenal sebagai MoU Kerja Sama Pariwisata. Kedua negara bekerja sama untuk mempromosikan pariwisata bersama, mengelola destinasi, dan mengembangkan infrastruktur. Untuk mempercepat pemulihan industri pariwisata kedua negara setelah pandemi COVID-19, Indonesia dan Kamboja sepakat untuk bekerja sama dalam bidang pariwisata melalui Memorandum Saling Pengertian atau MoU Kerja Sama pada Januari 2022. Bidang kerja sama termasuk promosi dan pemasaran pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, dan Selain itu, kerja sama ini termasuk kerja sama di bidang kebudayaan, seperti yang terjadi antara Angkor Wat dan Candi Borobudur. Indonesia dan Kamboja telah berkolaborasi dalam bidang pariwisata sebelum tahun 2022. Salah satunya adalah Nota Kesepahaman Kerja Sama Pariwisata tahun 1999.¹⁰ Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan "Upaya Kerjasama Indonesia dan Kamboja Dalam Pariwisata tahun 2022 - 2024"

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis menemui sebuah permasalahan untuk diteliti, yaitu "**Bagaimana kerjasama indonesia dan kamboja dalam pariwisata tahun 2022 - 2024?**"

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- mendeskripsikan potensi wisata indonesia.
- mendeskripsikan kerjasama indonesia-kamboja.
- menganalisis upaya kerjasama pariwisata Indonesia dan Kamboja dalam pariwisata.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- **Manfaat Teoritis**

¹⁰ "Indonesia – Kamboja Sepakati Kerja Sama Pariwisata untuk" 21 Jan. 2022, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/indonesia-kamboja-sepakati-kerja-sama-pariwisata-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi>. Diakses pada 19 Des. 2023.

Memberikan pemahaman mengenai bagaimana potensi pariwisata di Indonesia.

- **Manfaat Praktis**

Penelitian mengenai peran Kamboja dalam mempromosikan pariwisata di Indonesia kepada peneliti untuk memahami bagaimana Indonesia dapat meningkatkan pariwisatanya dengan dukungan dari Kamboja.

1.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjabaran diatas, fokus permasalahan yang akan dibahas adalah Upaya Kerjasama Pariwisata Indonesia dan Kamboja dalam Meningkatkan Devisa Negara. Tulisan ini menggunakan tingkat analisis Negara Bangsa. Pada saat ini, faktor tingkat negara memberikan penjelasan tentang perilaku negara. Rourke menyatakan bahwa ketika seorang peneliti menggunakan tingkat analisis negara, mereka harus memahami peran yang dimainkan oleh berbagai aktor negara—birokrat, kelompok kepentingan, dan legislator—dalam menentukan kebijakan luar negeri. Analisis tingkat nasional memberikan penjelasan yang tidak sekompelks penjelasan individu atau sistem.

Penulis telah menyediakan kerangka konseptual yang mencakup konsep, paradigma, dan teori yang terkait dengan subjek penelitian. Kerangka paradigma penulis dalam penelitian ini adalah konstruktivisme. Selanjutnya, teori pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep kerja sama bilateral.

Liberalisme adalah perspektif dalam ilmu hubungan internasional yang menekankan bahwa perdagangan bebas, kerja sama antar negara, hukum internasional, dan lembaga internasional sangat penting untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran global. Dalam hal kerjasama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja, pendekatan liberalisme ini dapat dilihat dalam upaya mereka untuk mempromosikan potensi pariwisata satu sama lain, bekerja sama dalam pengelolaan destinasi wisata, dan mengadakan perjanjian kerja sama untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan kedua negara. Dalam ilmu hubungan internasional, liberal menekankan bahwa perdagangan bebas, kerja sama negara, hukum internasional, dan lembaga internasional sangat penting untuk mencapai

perdamaian dan kemakmuran. Pendekatan liberalisme dalam kerja sama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja terlihat dalam upaya mereka untuk mempromosikan potensi pariwisata satu sama lain, bekerja sama dalam pengelolaan destinasi wisata, dan mengadakan perjanjian kerja sama untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan kedua negara. Dalam bidang filsafat, ontologi liberalisme telah dibahas, tetapi tidak ada informasi spesifik tentang hal itu dalam konteks kerjasama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja.¹¹

Menurut penulis paradigma inilah yang relevan dengan penelitian ini karena, meskipun aktor dalam penelitian ini adalah negara bangsa, topik diskusi ini akan membahas bagaimana konsep berubah ketika dunia pariwisata berkembang. Pada awalnya, pertumbuhan pariwisata hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi seiring berjalaninya waktu, pertumbuhan pariwisata sekarang juga berfokus pada pemasaran atraksi dan budaya masing-masing negara. Konsep ini kemudian mendorong Indonesia untuk memaksimalkan sumber daya alamnya untuk membangun infrastruktur dan mempromosikan pariwisata dengan bantuan Kamboja.

Kemudian, teori yang digunakan adalah teori kerjasama bilateral. Dalam hubungan internasional, istilah "kerjasama bilateral" mengacu pada kerjasama antara dua negara. Ini melibatkan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua negara untuk menjaga kepentingan bersama, seperti kerjasama politik, budaya, perdagangan, dan ekonomi. Pengembangan produk pariwisata yang berkelanjutan, pengelolaan destinasi wisata, dan promosi pariwisata adalah beberapa contoh bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah salah satu jenis kerjasama internasional yang dapat memengaruhi dinamika hubungan antar negara dalam kerangka teori hubungan internasional.¹²

Dalam hal pariwisata, teori kerjasama bilateral mengacu pada kerjasama antara dua negara untuk mencapai tujuan bersama, seperti promosi pariwisata, pengelolaan destinasi, dan pengembangan produk pariwisata yang berkelanjutan. Dalam teori hubungan internasional, salah satu bentuk kerjasama internasional yang dapat mempengaruhi perekonomian dan sektor pariwisata sebuah negara adalah kerjasama bilateral; ini dapat memengaruhi dinamika hubungan antar

¹¹ "FROM DUTCH MERCANTILISM TO LIBERALISM: INDONESIAN"
<https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39915>.

¹² "View of KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DENGAN"
<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/4073/3281>.

negara dan bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, pertumbuhan sektor pariwisata, dan pendapatan devisa.¹³

Pemakaian konsep pariwisata yang digunakan penulis dalam penelitian ini relevan dengan upaya Kerjasama Pariwisata Indonesia dan Kamboja sebagai sesama negara anggota ASEAN untuk saling meningkatkan pariwisata masing masing negara untuk meningkatkan ekonomi di masing masing negara.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode yang penulis pilih untuk tulisan ini adalah penelitian tipe deskriptif. Dengan menyajikan fenomena yang diteliti dalam bentuk tulisan, penelitian deskriptif membahas fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan di antara mereka dengan cara yang benar dan akurat. Hal ini memungkinkan penelitian ini untuk menggambarkan fenomena dengan cara yang unik, asli, dan modern. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan inisiatif yang diambil oleh pemerintah negara Kamboja dan Indonesia untuk saling mendukung dalam meningkatkan objek pariwisata di masing masing negara.

1.5.2 Perspektif Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh dari sudut pandang individu, kelompok, dan konteks sosial. Metode ini menekankan pengumpulan data deskriptif, seperti analisis dokumen; penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi lebih fokus pada memahami fenomena secara menyeluruh. Metode kualitatif berasal dari berbagai jenis penelitian, termasuk fenomenologi, etnografi, studi kasus, studi dokumen, dan pengamatan atau observasi alami. Namun, karena hanya menggunakan sampel kecil atau narasumber, penelitian kualitatif tidak dapat dianggap sebagai representasi keseluruhan populasi. Dalam metode kualitatif,

¹³ "View of KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DENGAN"
<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/4073/3281>. Diakses pada 21 Des. 2023.

asumsi dasar adalah bahwa kenyataan adalah suatu yang berdimensi jamak, kesatuan dan berubah-ubah.

1.5.3 Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan literatur untuk melakukan pencarian dan pengamatan tentang pembahasan yang akan diteliti. Mereka melakukan ini dengan membaca artikel, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan subjek penelitian.

1.5.4 Jenis Data

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data tentang variabel penelitian kerjasama pariwisata Indonesia dan kamboja dalam meningkatkan devisa negara.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan melihat dan mengkaji data kepustakaan yang relevan dan kemudian mengolah data tersebut untuk penyajian kualitatif. Penulis akan menggunakan buku, artikel, dan jurnal terkait sebagai referensi dalam penelitian.

1.5.6 Sumber Data

Sumber-sumber data untuk penelitian ini akan berasal dari tinjauan yang diakses secara online.

1.5.7 Model Analisis

Analisis deskriptif adalah model yang digunakan untuk analisa. Dalam penelitian ini, negara atau bangsa berfungsi sebagai tingkat analisis dan unit eksplanasi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, kerangka pemikiran, teknik penelitian, dan sistematika penulisan akan dilampirkan dalam BAB ini.

BAB II : POTENSI PARIWISATA INDONESIA

Bab ini akan berisikan mengenai potensi pariwisata di Indonesia.

BAB III : KERJASAMA INDONESIA-KAMBOJA

Bab ini akan menjelaskan bagaimana kerjasama Indonesia dan Kamboja.

BAB IV : UPAYA KERJASAMA INDONESIA KAMBOJA DALAM PARIWISATA TAHUN 2022 - 2024

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana kerjasama Indonesia dan Kamboja dalam sektor pariwisata untuk meningkatkan potensi pariwisata di indonesia pada tahun 2022-2024.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan studi dan penjelasan penulis dari bab sebelumnya.

BAB II

PARIWISATA DI INDONESIA

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak potensi wisata, termasuk keindahan alam, budaya dan tradisi leluhur, suku dan bahasa, makanan, serta hasil kerajinan di setiap daerah. Potensi wisata yang ada di Indonesia memberikan sumbangan positif bagi negara melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, penyerap tenaga kerja, dan peningkatan industri kreatif. Berdasarkan Buku Saku Kementerian Pariwisata (2016), kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 mencapai 9 % atau sekitar Rp 946,09 triliun. Sementara itu, devisa dari sektor pariwisata pada tahun yang sama mencapai Rp 120 triliun dengan kontribusi untuk kesempatan kerja sebesar 11 juta orang. Besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap penerimaan devisa, pendapatan daerah dan nasional, serta pengembangan wilayah meningkatkan harapan akan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia.¹⁴

Indonesia atau Nusantara, sekurang-kurangnya terdiri dari: 13.000 pulau; 516 suku bangsa; 746 bahasa; dan ribuan unsur kebudayaan. Semua ini sangat penting untuk identitas bangsa Indonesia. Agar kebudayaan tidak punah, ia harus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Karena kebudayaan adalah atraksi utama pariwisata Indonesia, kebudayaan adalah titik singgung antara keduanya. Sebelumnya, pariwisata Indonesia terbatas pada beberapa destinasi wisata, seperti Bali, Yogyakarta, dan Jakarta, meskipun ada banyak destinasi wisata yang berbeda. Destinasi wisata favorit telah meningkat belakangan ini, terutama selama pemerintahan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Struktur Kementerian Pariwisata direvisi untuk menarik lebih banyak wisatawan dari berbagai tempat di seluruh dunia. Saat ini, sepuluh destinasi wisata paling populer di Indonesia adalah Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Lombok, Labuan Bajo, Flores, Tanjung Lesung, Banten, Tanjung Kalengana, Belitung, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan Kota Tua Jakarta bersama dengan Kepulauan Seribu.

¹⁴ Melinda, Mona, (2019)"Permasalahan pengembangan potensi pariwisata." 2.

2.1 Potensi Pariwisata Indonesia

Indonesia memiliki alam yang beragam dan melimpah karena menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki banyak keindahan alam yang dapat menjadi destinasi wisata kelas dunia, mulai dari pantai-pantai yang menakjubkan hingga hutan tropis yang lebat dan pegunungan yang megah. Dengan demikian, sumber daya alam yang tersedia menjadi bagian penting dari kemajuan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Cooper et al. (2008), pariwisata adalah salah satu bidang ekonomi terbesar di dunia yang memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan negara dan memberikan banyak peluang kerja. Disebabkan oleh keindahan alam dan kekayaan budaya yang tak tertanding, pariwisata Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Potensi ini belum dimanfaatkan sepenuhnya, namun, terutama di wilayah yang belum berkembang. Indonesia, yang disebut sebagai "Nusantara", memiliki lebih dari 17.000 pulau, dan setiap pulau memiliki ciri khas dan daya tarik alamnya sendiri. Keberagaman geologis dan hayati Indonesia disebutkan oleh Smith (2010), memungkinkan pertumbuhan pariwisata ekologi yang berfokus pada pelestarian dan eksplorasi sumber daya alam. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa sumber daya alam tetap berkelanjutan untuk generasi berikutnya, pengembangan sektor pariwisata harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi luar biasa dalam sektor pariwisata. Keindahan alam, keanekaragaman budaya, serta sejarah yang kaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki daya tarik unik yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah dan masyarakat terus berupaya mengembangkan potensi ini dengan meningkatkan infrastruktur, promosi wisata, serta menjaga kelestarian alam dan budaya.

Salah satu potensi wisata terbesar di Indonesia adalah wisata alam. Indonesia memiliki berbagai macam destinasi alam yang memukau, seperti pantai eksotis, gunung berapi, hutan tropis, dan danau indah. Contohnya, Bali dikenal dengan pantai-pantainya yang indah seperti Kuta dan Nusa Dua, sementara Raja Ampat di Papua terkenal dengan keanekaragaman hayati bawah lautnya. Selain itu, Gunung Bromo di Jawa Timur dan Danau Toba di Sumatera Utara menjadi daya

tarik utama bagi wisatawan yang menyukai petualangan dan pemandangan spektakuler.

Selain wisata alam, Indonesia juga kaya akan wisata budaya dan sejarah. Setiap daerah memiliki adat istiadat serta tradisi yang berbeda-beda, mencerminkan keberagaman yang ada di Nusantara. Yogyakarta, misalnya, menjadi pusat budaya Jawa dengan Keraton dan Candi Borobudur yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Sementara itu, Toraja di Sulawesi Selatan menawarkan wisata budaya dengan rumah adat tongkonan dan upacara pemakaman unik yang menjadi daya tarik bagi wisatawan asing. Festival budaya seperti Pasola di Sumba dan Tari Kecak di Bali juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang menarik perhatian dunia.

Kategori Wisata	Destinasi Unggulan	Keunikan
Wisata Pantai	Bali (Kuta, Nusa Dua)	Pasir putih, ombak selancar
Wisata Bawah Laut	Raja Ampat	Terumbu karang terbaik
Wisata Pegunungan	Gunung Bromo	Pemandangan matahari terbit
Wisata Danau	Danau Toba	Danau vulkanik terbesar
Wisata Budaya	Yogyakarta (Borobudur, Keraton)	Candi Buddha terbesar
Wisata Tradisional	Toraja	Upacara adat khas

Dengan kekayaan potensi wisata yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara. Pengembangan infrastruktur, promosi digital, serta pelestarian alam dan budaya menjadi kunci utama dalam menarik lebih banyak wisatawan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata, Indonesia dapat terus mempertahankan posisinya sebagai destinasi unggulan di mata dunia.

Ada banyak cara kekayaan alam Indonesia dapat membantu pertumbuhan pariwisata. Misalnya, Raja Ampat di Papua Barat terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang kaya akan biodiversitas dan menjadi surga bagi penyelam dari seluruh dunia. Sebaliknya, Bali terkenal dengan pantainya yang indah dan budayanya yang unik, membuatnya menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik dan internasional. Namun, Hall dan Page (2014), pakar pariwisata, menekankan bahwa pengelolaan yang baik dan perencanaan yang matang sangat penting untuk mencegah wisata yang berlebihan dan kerusakan lingkungan.¹⁵

Selain itu, pengembangan sektor pariwisata harus memperhitungkan partisipasi masyarakat lokal. Tosun (2006) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari pariwisata didistribusikan secara merata. Banyak komunitas lokal di Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan meskipun berada di daerah yang memiliki banyak potensi wisata. Oleh karena itu, sebagai bagian penting dari industri pariwisata, strategi pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal dan inklusif.

Modal wisata budaya, alam, dan manusia adalah tiga kategori umum aset wisata. Sebenarnya, Indonesia memiliki ketiga sumber daya wisata ini. Dalam hal modal budaya, Indonesia telah lama dikenal dengan keanekaragaman budaya tradisional dan artefak-artefak budaya dari lebih dari 300 suku bangsa yang tinggal di sana. Tari tradisional seperti Pendet, Kecak, Serimpi, dan lainnya telah dikenal secara global. Selain itu, ada suku-suku yang memiliki budaya yang menarik di Indonesia, seperti Baduy di Banten dan Asmat di Papua.

¹⁵ Astuti, Nur S. W. "Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Kota Magelang (Studi pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang)." *Jurnal Paradigma Multidisipliner*, vol. 2, no. 3, 2021,

Modal alam Indonesia adalah laut, pantai, gunung, danau, dan hutan yang indah bersama dengan berbagai jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki banyak daya tarik pariwisata, termasuk Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kelimutu di NTT, Taman Laut Nasional Bunaken di Sulawesi Utara, dan indahnya pantai Sanur dan Kuta di Bali. Dalam hal sumber daya manusia, kita juga memiliki pekerja pariwisata yang berpengalaman, tetapi jumlah mereka masih perlu ditingkatkan. Sikap dan perilaku orang Indonesia terhadap para wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah modal manusia yang harus dipertahankan dan dikembangkan terus menerus. Misalnya, mereka harus bersikap ramah dan bersahabat.

2.2 Permasalahan Pariwisata di Indonesia

Meskipun memiliki potensi wisata yang besar, Indonesia juga menghadapi berbagai permasalahan dalam pengembangan sektor pariwisata. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya infrastruktur di beberapa destinasi wisata. Jalan yang rusak, keterbatasan transportasi umum, serta kurangnya fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran menjadi kendala bagi wisatawan untuk mengakses tempat-tempat wisata tertentu, terutama yang berada di daerah terpencil. Selain itu, masalah kebersihan dan kelestarian lingkungan juga menjadi perhatian dalam industri pariwisata Indonesia. Banyak destinasi wisata yang mengalami degradasi lingkungan akibat sampah yang berserakan dan eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan. Kurangnya kesadaran masyarakat dan wisatawan dalam menjaga kebersihan serta belum optimalnya pengelolaan sampah di beberapa lokasi wisata memperburuk kondisi ini. Kurangnya promosi dan pemasaran yang efektif juga menjadi hambatan dalam menarik lebih banyak wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Beberapa destinasi wisata di Indonesia belum dikenal luas di dunia internasional akibat minimnya kampanye pemasaran digital dan kurangnya strategi branding yang kuat. Padahal, dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial, pariwisata Indonesia dapat menjangkau lebih banyak calon wisatawan.

Permasalahan	Penyebab	Dampak

Infrastruktur	Jalan rusak, transportasi minim	Akses wisata sulit
Kebersihan	Kurangnya kesadaran wisatawan	Degradasi lingkungan
Promosi	Kurang pemasaran digital	Minimnya wisatawan asing
Regulasi	Kurangnya aturan yang ketat	Eksplorasi sumber daya

Dengan mengatasi permasalahan ini melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, sektor pariwisata Indonesia dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara. Peningkatan infrastruktur, edukasi tentang kebersihan, serta strategi pemasaran yang lebih efektif dapat menjadi langkah konkret untuk membawa pariwisata Indonesia ke tingkat yang lebih baik.

Banyak lokasi di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang tinggi, tetapi belum dikelola dengan baik. Salah satunya adalah potensi wisata di Kabupaten Kerinci. Meskipun Kabupaten Kerinci telah ditetapkan sebagai tujuan pariwisata Provinsi Jambi melalui SK Gubernur Jambi Nomor 920/KEP.GUB/DISBUDPAR.1/IX/2016, kunjungan wisatawannya belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dalam pengelolaan program pengembangan destinasi wisatanya, seperti terbatasnya anggaran, kurangnya kerjasama dan koordinasi di antara berbagai pihak, serta minimnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan (Adrianto, 2019).

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam kemajuan industri pariwisata karena peran mereka sebagai penggerak dan agen pelaksana pengembangan industri serta peran mereka sebagai faktor kunci dalam memastikan keberhasilan kinerja anggaran. Selain itu, SDM juga merupakan komponen yang sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Ria Anggraini, 2015 & Farid Kharisma, 2012) bahwa salah satu masalah utama dalam pengembangan

industri pariwisata adalah pembagian dana dan anggaran. Meskipun perencanaan pengembangan telah dibuat dan siap, pelaksanaan pengembangan akan tertunda jika tidak ada dana. Selain itu, adanya kerja sama dan koordinasi antara berbagai pihak juga menjadi salah satu faktor dalam kemajuan pariwisata. Dalam penelitian (I Putu Gede,2015) dijelaskan bahwa dalam pengembangan tempat dan daya tarik wisata di Kabupaten Lombok Barat perlu dibangun kerja sama dengan semua pemangku kepentingan yang saling mendukung untuk dapat membangun daerah dan mengembangkan potensi alam dan budaya.

Di Indonesia belum ada pemerataan atau pemerataan wisatawan mancanegara di seluruh destinasi tiap daerah. Hal itu ditandai dengan berkumpulnya wisman di beberapa titik pintu masuk, antara lain Bali, Jakarta, dan Batam. Dengan demikian, ada anggapan bahwa daerah-daerah lain di Indonesia tidak bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan pariwisata, padahal kenyataannya tidak demikian. Ketidakefektifan saluran distribusi menjadi salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata banyak permasalahan yang menyebabkan wisatawan memilih pintu masuk ketiga kawasan tersebut. Motivasi Kunjungan Wisatawan Asing. Kunjungan atau kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia tidak hanya untuk bersenang-senang saja. Masing-masing mempunyai alasan atau tujuan masing-masing. Apalagi setiap wisatawan yang berkunjung pada umumnya sudah membuat rencana kunjungan mengenai tempat atau daerah yang dituju. Kepentingan atau tujuan kunjungan wisatawan antara lain untuk berbisnis, menghadiri konferensi/pertemuan, melakukan perjalanan spiritual, dan berlibur. Berdasarkan motivasi pengunjung asing tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa kondisi tersebut menjadikan daerah-daerah yang tidak banyak mempunyai potensi pariwisata hanya mendapat sedikit wisatawan atau pengunjung asing. Jakarta misalnya, mayoritas kedatangan atau kunjungan wisatawan asing ke Jakarta dilatarbelakangi oleh tujuan bisnis seperti menghadiri konferensi/pertemuan. Hal ini berasalan karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia, dan sebagian besar kantor pusat berlokasi di sana. Sangat kecil kemungkinannya wisatawan mancanegara datang ke Jakarta untuk berlibur/berlibur karena kondisinya yang tidak mendukung. Selain kemacetannya, Jakarta juga kurang

mampu menyediakan destinasi wisata alam. Kalaupun ada, pasti di luar perkotaan dan butuh waktu lama untuk mencapainya.¹⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Jakarta lebih mengembangkan destinasi wisata MICE (Meeting, Incentives, Convention, dan Exhibition). Ketersediaan fasilitas untuk melakukan kegiatan tersebut setidaknya mampu memperlancar motivasi wisatawan untuk berkunjung ke sana. Banyaknya hotel dan ballroom yang digunakan untuk pertemuan membuktikan hal tersebut. Berbeda dengan Jakarta, mayoritas wisatawan mancanegara yang datang ke Bali dilatarbelakangi oleh tujuan berlibur. Mereka fokus bersenang-senang. Kalaupun untuk urusan bisnis, itu bukanlah tujuan atau motivasi utama kunjungan mereka (relatif kecil). Oleh karena itu, banyak wisatawan yang lebih memilih tempat yang alami, aman, jauh dari suasana bising, dan dilengkapi infrastruktur pariwisata yang baik.

Bali menyediakan banyak sekali destinasi wisata yang diminati dan menarik bagi para wisatawan mancanegara yang murni berlibur. Mereka biasanya akan betah jika tinggal di Bali dan cenderung tidak pindah ke tempat lain karena di sana mereka bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan. Kondisi seperti itu bisa terjadi karena Bali memang lebih fokus pada kegiatan pariwisatanya yang bersifat menghibur. Penyediaan infrastruktur di Bali yang lebih baik dibandingkan daerah lain di Indonesia membuat wisatawan mancanegara lebih cenderung memilih Bali dibandingkan daerah/wilayah liburan lainnya. Beragamnya motivasi wisatawan mancanegara membuat sebaran kunjungannya menjadi tidak merata atau merata di setiap daerah/daerah di Indonesia. Untuk menarik wisatawan mancanegara datang ke suatu daerah, maka harus ada destinasi yang bagus dan dapat membuat mereka diinginkan atau diminati. Dengan demikian, setiap daerah pasti mempunyai kekhasan masing-masing yang kemungkinan besar akan menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Secara umum daerah-daerah di Indonesia kurang mampu mengembangkan potensinya sebagai daerah tujuan wisata. Adanya kecenderungan untuk meniru destinasi wisata terkenal dan unggulan daerah lain, meskipun konsepnya dibuat sama persis namun dengan nama yang berbeda. Perkembangan Jember Fashion Carnaval (JFC) misalnya,

¹⁶ ("Supriono et al. "PROBLEM IDENTIFICATION OF FOREIGN TOURIST DISTRIBUTION IN INDONESIA." Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 67 (2017): 115-120.

banyak ditiru atau diikuti oleh banyak daerah lain di Indonesia yang konsepnya sama. Selain itu, terkadang setiap daerah mempunyai konsep yang bersaing dengan daerah lainnya. Apabila suatu daerah mempunyai destinasi wisata tertentu, maka daerah lain juga harus membuat destinasi dengan konsep yang sama. Misalnya, jika di suatu daerah terdapat atraksi wisata atau tarian tradisional yang disebut 'reog', maka daerah lain juga akan mengembangkan atau meniru konsep 'reog' tersebut.¹⁷

Kondisi seperti ini menyebabkan destinasi wisata di Indonesia tidak semakin kaya atau berkembang; sebaliknya, ini akan menjadi lebih homogen. Wisatawan asing cenderung mudah bosan karena pernah melihat tempat wisata yang itu-itu saja di beberapa daerah. Hal ini dikarenakan kecenderungan wisatawan asing berkunjung ke suatu daerah adalah untuk mengetahui dan merasakan pengalaman baru yang berbeda dari sebelumnya. Jika mereka disuguhkan hal/ketertarikan yang sama, maka akan membuang-buang waktu mereka. Apalagi ketika mereka bosan dengan destinasi wisata yang selama ini mereka alami, ada kemungkinan mereka tidak akan merekomendasikan teman-temannya untuk berkunjung ke suatu tempat di Indonesia setelah kembali ke negaranya. Terbatasnya Tiket Masuk Wisatawan Asing yang Datang ke Indonesia. Pintu masuk nasional atau gerbang Indonesia bagi wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung dikategorikan terbatas. Yang paling terkenal antara lain Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Jakarta melalui Bandara Soekarno Hatta, serta Batam melalui Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batam Center. Kurangnya Indonesia hanya memiliki tiga wilayah tersebut saja yang bisa dikunjungi wisatawan mancanegara, mengingat Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas mulai dari Sabang hingga Merauke. Pintu masuk atau gerbang nasional sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Faktanya kunjungan wisman ke Indonesia mayoritas harus melewati 3 (tiga) gerbang tersebut padahal tujuan utamanya belum tentu ke ketiga wilayah tersebut. Akhirnya, mau tidak mau, mereka harus melewati wilayah tersebut. Sebenarnya ada juga pintu masuk atau gerbang lain menuju Indonesia, seperti

¹⁷ ("Supriono et al. "PROBLEM IDENTIFICATION OF FOREIGN TOURIST DISTRIBUTION IN INDONESIA." Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 67 (2017): 115-120.

Bandara Juanda (Sidoarjo), Bandara Hasanudin (Makassar), Bandara Internasional Lombok (Praya), Bandara Kualanamu (Medan), dan lain sebagainya. Namun sebagian besar gerbang tersebut belum familiar di kalangan wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Indonesia. Dengan kondisi seperti itu, setiap wisatawan akan mengeluarkan banyak uang untuk mencapai destinasi yang ingin dikunjungi. Misalnya wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke Taman Bunaken harus melewati Jakarta terlebih dahulu untuk transit baru kemudian menuju Taman Bunaken. Hal serupa juga terjadi pada wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke Danau Toba, Raja Ampat, Toraja, dan lain-lain. Tidak menjadi masalah jika terjadi pada wisatawan mancanegara yang berasal dari negara-negara di benua Asia karena letaknya yang relatif dekat dengan Indonesia. Namun menjadi kendala bila wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia berasal dari benua Eropa atau Amerika karena tentunya akan memakan waktu perjalanan yang lebih lama untuk sekedar transit. Indonesia memang perlu mengembangkan, memperluas, dan memperbanyak pintu masuk atau gerbang kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini dikarenakan jarak antar wilayah yang relatif memerlukan waktu yang sangat lama untuk dijangkau. Jika pintu masuk nasional hanya terfokus pada tiga wilayah tersebut, kecil kemungkinan banyak wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke wilayah atau wilayah lain di Indonesia, kecuali mereka mempunyai banyak uang dan waktu. Memang benar Bandara Soekarno Hatta Jakarta menyediakan beragam penerbangan ke berbagai daerah di Indonesia meski jarak yang harus ditempuh bisa sangat jauh karena letaknya yang tidak tepat berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Bandara ini mungkin hanya bisa menjangkau wilayah Indonesia bagian barat karena perjalanan hanya memakan waktu maksimal 2 jam. Namun hal tersebut tidak berlaku di wilayah timur yang rata-rata jarak tempuhnya dari Jakarta lebih dari 4 jam dan memerlukan biaya yang relatif mahal.

Pintu masuk atau gerbang utama wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia kali ini adalah Bandara Soekarno Hatta. Namun faktanya, banyaknya kunjungan atau kedatangan wisman ke Jakarta tidak sejalan dengan banyaknya kunjungan wisman ke destinasi wisata Jakarta. Di Bandara Soekarno Hatta, total kunjungan wisman dilaporkan sebanyak 2.455.279 orang (Ditjen Imigrasi, 2016), dan pada tahun yang sama, jumlah kunjungan wisman di destinasi pariwisata Jakarta hanya 95.701 orang. (Badan Pusat Statistik Jakarta, 2016). Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan mayoritas wisatawan asing datang dan melewati Bandara Soekarno Hatta hanya untuk transit.

Kurangnya Jaringan Pariwisata antar Daerah. Jaringan pariwisata antar daerah di Indonesia dapat dikategorikan minim atau terbatas dan cenderung terfokus pada kedaerahan. Hal ini akan sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan asing dari suatu daerah/daerah ke daerah lain, mengingat wisatawan asing tidak akan mengunjungi tempat atau daerah yang kurang dikenal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan pariwisata di Bali (agen perjalanan, pemilik penginapan, restoran, dll) sebagai tempat yang paling sering dikunjungi wisatawan mancanegara, mayoritas wisatawan mancanegara menyatakan tidak pernah melayani paket wisata ke daerah selain Bali, bahkan tidak pernah merekomendasikan ke daerah luar Bali. Kalaupun ada, mereka hanya akan merujuk pada wilayah yang masih cukup dekat dengan Bali, seperti Lombok atau Flores (Pulau Komodo). Kurangnya komunikasi menjadi faktor utama penyebab pasif atau ketidakpedulian terhadap perkembangan destinasi wisata lainnya. Banyak pelaku pariwisata yang puas dan kewalahan melayani paket wisata di daerahnya masing-masing, khususnya di Bali, Jakarta, dan Batam. Oleh karena itu, sebagian besar wisatawan mancanegara cenderung berkunjung atau berkumpul di ketiga wilayah tersebut. Mereka jarang mengunjungi destinasi lain di Indonesia. Hal ini bukan karena mereka tidak mau, melainkan mereka kurang mempunyai informasi atau pengetahuan terkait keberadaan destinasi wisata selain ketiga wilayah tersebut. Kondisi seperti ini masih dibarengi dengan situasi persaingan seperti pemberian penghargaan destinasi wisata daerah terbaik tingkat nasional. Sebenarnya acara ini mempunyai tujuan yang baik, yaitu untuk mendorong para pelaku pariwisata mengembangkan pariwisata daerahnya dan akhirnya bisa belajar banyak dari daerah-daerah peraih penghargaan pariwisata terbaik. Namun dampak negatif yang dapat timbul adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat/tidak sehat dimana terdapat kecenderungan untuk menganggap daerah/daerah lain sebagai pesaing, bukan sebagai mitra dalam kegiatan pariwisata. Jika pemerintah ingin ada kemajuan dalam bidang pariwisata di Indonesia, maka para pelaku pariwisata harus menjalin hubungan yang tidak terfokus pada masing-masing daerah saja. Mereka harus menjadikan pariwisatanya sebagai daya tarik global atas nama Indonesia. Tidak perlu ada persaingan karena

setiap daerah di Indonesia pasti mempunyai keberagaman dan mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak bisa dimiliki atau ditiru oleh daerah lain.¹⁸

Membangun kerja sama merupakan solusi tepat yang mungkin bisa diterapkan jika pemerintah daerah atau pelaku pariwisata ingin mendapatkan kunjungan wisatawan mancanegara antar daerah. Kerjasama tersebut dapat berupa pertukaran informasi (khususnya antara daerah yang banyak dikunjungi wisatawan asing dan daerah yang tidak banyak dikunjungi wisatawan asing). Agen perjalanan wisata juga dapat melakukan kerjasama dalam bidang penyediaan paket wisata antar daerah. Adanya kerja sama ini juga akan meningkatkan manfaat bagi para pelaku pariwisata. Para pelaku pariwisata dapat saling mengelola wisatawan asing yang datang dari suatu daerah dan memberikan rekomendasi kepada mereka untuk mengunjungi destinasi wisata di daerah lain. Tujuan kerjasama tersebut adalah untuk memperluas jalur distribusi pariwisata dan melibatkan banyak pihak (misalnya pihak travel agent di wilayah A dan wilayah B). Dengan kata lain, jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata semakin meningkat. Dengan demikian, adanya kegiatan pariwisata antar daerah yang terintegrasi di Indonesia akan memberikan manfaat bagi banyak pihak karena kunjungan mancanegara merata di setiap daerah.¹⁹

Kegiatan Promosi yang Kurang Efektif. Berdasarkan jawaban wisatawan mancanegara pada penelitian ini mengenai keberadaan destinasi wisata di Indonesia, diketahui bahwa sebagian besar wisatawan mancanegara belum banyak mengetahui tentang pariwisata Indonesia. Yang mereka tahu hanya sebatas Bali, Yogyakarta, Jakarta, dan Batam. Selanjutnya ketika ditanya apakah ingin mengunjungi destinasi wisata di daerah lain di Indonesia, mereka menjawab ragu-ragu. Kegiatan promosi pariwisata Indonesia dinilai kurang efektif bagi wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara sebagian besar mendapatkan informasi pariwisata Indonesia dari internet, bukan dari kegiatan promosi yang sering diadakan oleh Pemerintah dan biro perjalanan. Hal ini menandakan bahwa kegiatan promosi yang diselenggarakan kurang tepat sasaran. Berdasarkan data travel agent, kegiatan promosi yang biasa dilakukan adalah dengan menjalin

¹⁸ ("Supriono et al. "PROBLEM IDENTIFICATION OF FOREIGN TOURIST DISTRIBUTION IN INDONESIA." Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 67 (2017): 115.

¹⁹ ("Supriono et al. "PROBLEM IDENTIFICATION OF FOREIGN TOURIST DISTRIBUTION IN INDONESIA." Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 67 (2017): 117.

kerjasama antara travel agent Indonesia dengan travel agent internasional/asing. Namun kegiatan promosi tersebut dinilai kurang efektif karena tidak semua wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia menggunakan jasa agen perjalanan. Banyak dari mereka yang melakukan kunjungan secara mandiri atau diundang oleh teman atau mitra bisnisnya yang berasal dari Indonesia. Menurut wisatawan asing, cara yang paling efektif untuk melakukan promosi adalah melalui jaringan internet. Sudah menjadi kebiasaan atau kecenderungan bahwa setiap wisatawan asing yang akan berkunjung ke suatu negara pasti akan mencari informasi terkait negara tersebut melalui internet. Begitu mereka mendapatkan informasi yang memadai tentang negara tersebut, mereka akan pergi mengunjunginya. Selain itu, keamanan menjadi salah satu faktor yang sering membuat para wisatawan menjadi ragu untuk mengunjungi suatu daerah atau kawasan di Indonesia. Wisatawan asing di Bali kerap menghabiskan waktu liburannya berhari-hari, bahkan berbulan-bulan karena merasa aman berada di sana. Sebab, promosi pariwisata Bali telah menjamin masyarakat Bali akan menjamin keamanan setiap wisatawan yang berkunjung ke sana. Daerah atau wilayah lain di Indonesia belum mampu mempromosikan dan menjamin keamanan wisatawan mancanegara sebaik Bali. Sebab, selain bersenang-senang, wisatawan asing pasti ingin keamanannya terjamin. Hal ini pula yang membuat distribusi wisatawan mancanegara di Indonesia kerap mengalami kendala.²⁰

²⁰ ("Supriono et al. "PROBLEM IDENTIFICATION OF FOREIGN TOURIST DISTRIBUTION IN INDONESIA." Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 67 (2017): 117.

BAB III

KERJASAMA INDONESIA-KAMBOJA DILUAR SEKTOR

PARIWISATA

Kerjasama antara Indonesia dan Kamboja telah berlangsung dalam berbagai bentuk, terutama dalam upaya menciptakan perdamaian dan menangani isu-isu regional. Indonesia memainkan peran penting dalam upaya perdamaian di Kamboja selama periode konflik 1979-1992. Indonesia berkontribusi melalui ASEAN dan PBB, dengan mengadakan pertemuan penting seperti Ho Chi Minh City Understanding (1987) dan Jakarta Informal Meeting (JIM) I dan II (1988-1989). Puncaknya adalah Konferensi Internasional Paris tentang Kamboja pada tahun 1991 yang menghasilkan Perjanjian Paris, menandai akhir dari konflik di Kamboja.²¹ ²²Indonesia juga terlibat dalam menangani masalah perdagangan manusia di Kamboja. Strategi yang diterapkan meliputi kerjasama internasional, pembentukan tim kerja khusus, penerapan ketat peraturan pemerintah, dan komunikasi yang konsisten. Kerjasama ini tidak hanya dilakukan di tingkat Asia Tenggara tetapi juga dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat.²³ Indonesia telah menjadi tuan rumah dan inisiatör berbagai pertemuan internasional untuk membahas situasi di Kamboja. Pada tahun 1970, Indonesia mengadakan konferensi dengan sebelas negara Asia untuk membahas cara-cara memulihkan perdamaian di Kamboja. Pertemuan ini menunjukkan peran aktif Indonesia dalam diplomasi regional dan internasional.²⁴ Kerjasama antara Indonesia dan Kamboja mencerminkan komitmen Indonesia dalam mempromosikan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, serta menunjukkan kemampuan diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan konflik regional.

²¹ Prasad, M. (2017). Indonesia's Role in the Resolution of the Cambodian Problem.

²² Sudrajat, A., Widiyanta, D., Murdiyastomo, H., Ikaningtiyas, D., Huda, M., & Safar, J. (2020). THE ROLE OF INDONESIA IN CREATING PEACE IN CAMBODIA: 1979-1992. , 7, 702-706.

²³ Pratiwi, H., & Sukandar, R. (2024). Indonesia's strategy in ASEAN in handling the issues of human Trafficking in Cambodia. *Jurnal Mantik*.

²⁴ Gordon, B., & Young, K. (1971). The Khmer Republic: That Was the Cambodia That Was. *Asian Survey*, 11, 26-40.

3.1 Peran Indonesia dalam Penyelesaian Perdagangan Manusia di Kamboja

Indonesia berperan aktif dalam menangani isu perdagangan manusia di Kamboja melalui kerja sama bilateral dan multilateral. Melalui berbagai inisiatif, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum dan perlindungan bagi korban, serta meningkatkan kesadaran akan bahaya perdagangan manusia.

3.1.1 Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Aksi Nasional

Rencana Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024. Peraturan Presiden ini mengatur ketentuan terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai wujud strategi Pemerintah Indonesia sebagai aksi tingkat nasional, yang meliputi serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana Perdagangan Orang. Kementerian/Lembaga bertanggung jawab melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Perdagangan Orang sesuai tugas dan fungsinya. Data yang dilansir Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sasaran Pemerintah dalam Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 untuk melindungi anak, perempuan dan kelompok marginal. Strategi penerbitan Peraturan Presiden ini adalah untuk mencapai target Pemerintah dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu 1) pada tahun 2024, target indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas sosial dan korban Trafficking sebesar 0,41%, meningkat dari sebelumnya sebesar 0,34% pada tahun 2019. 2) Sasaran Gender Indeks Pembangunan (IPG) pada tahun 2024 berkisar antara 91,24 hingga 91,54%, meningkat dari 90,06% pada tahun 2020, dan 3) prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun dalam 12 bulan terakhir (2024) terus menurun dari 9,4%. (SHPN, 2016) menjadi 8,7% (SHPN, 2021) (Wahyu, 2023).

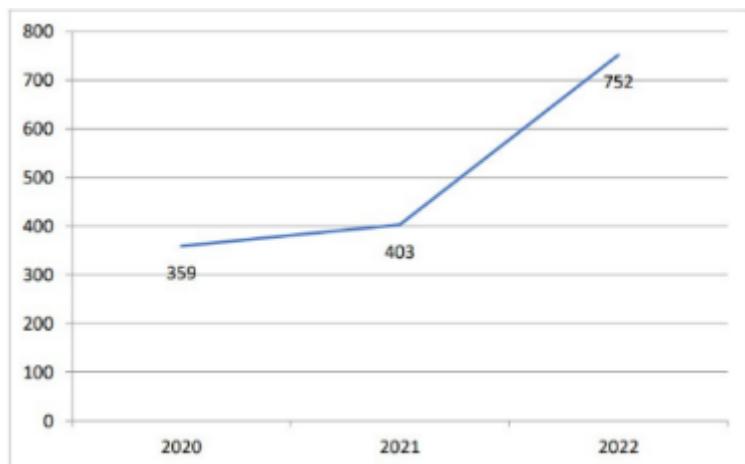
Dasar hukum yang mengatur tentang Perdagangan Orang di Indonesia mencakup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berkenaan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan turunannya. Sementara itu, perlindungan bagi saksi dan korban dalam kasus tindak pidana ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali terdapat ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut. Dalam konteks ini, korban adalah individu yang mengalami penderitaan yang bersifat psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial akibat tindak pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga telah menetapkan sanksi pidana yang berat, yaitu hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda yang mencapai ratusan juta rupiah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penanganan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilaksanakan dengan lebih tepat dan efektif.

3.1.2 Pembentukan Memorandum of Understanding (MOU) mengenai ketenagakerjaan antara Indonesia dan Kamboja

Data dari situs Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa pada 22 Agustus 2023, kepolisian Indonesia dan Kamboja sepakat untuk bekerja sama dalam pencegahan dan pengendalian kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas. Kesepakatan ini diwujudkan dengan penandatanganan MoU yang terjadi dalam rangka ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kedua belah pihak sepakat bahwa tim teknis dari kepolisian kedua negara akan segera mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai permasalahan, antara lain kerja sama investigasi, bantuan hukum yang saling mendukung, penunjukan contact person untuk menangani kasus dengan cepat, dan penandatanganan nota kesepahaman. kesepahaman (MoU) antara kedua kepolisian. Terkait penanganan kasus perdagangan manusia. Pada tanggal 4 September 2023, KBRI di Phnom Penh bertemu dengan Kapolda Phnom Penh, Mayjen Chuon Narin. KBRI Phnom Penh dan Kepolisian Daerah Phnom Penh berharap dapat terus memperkuat komunikasi dan kerja sama untuk mendukung berkembangnya hubungan positif antara Indonesia dan Kamboja. Fokusnya antara lain peningkatan kolaborasi dalam rangka kerjasama Police-to-Police yang baru-baru ini dilakukan. ditetapkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (POLRI, 2023).

3.1.3 Membangun komunikasi di seluruh kawasan Asia

Dalam laporan Trafficking in Person yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2017 disebutkan bahwa Indonesia berperan sebagai sumber, tujuan dan jalur transit utama bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kerja paksa dan Trafficking. Manusia selama lima tahun terakhir. Masing-masing dari 34 provinsi di Indonesia juga terlibat sebagai sumber dan tujuan praktik perdagangan manusia (Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, 2017). Pelaku perdagangan manusia menyalahgunakan berbagai bentuk pekerjaan warga negara Indonesia; mereka terlibat dalam tindakan eksplorasi melalui kekerasan dan tekanan. Pernyataan Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika di Indonesia menunjukkan bahwa banyak WNI yang bekerja di luar negeri secara ilegal, sehingga tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya dijamin oleh undang-undang ketenagakerjaan di negara tempat mereka beroperasi, dan seringkali mereka mengalami berbagai bentuk perdagangan manusia, seperti seperti jam kerja yang berlebihan, tidak adanya kontrak formal, dan tidak dibayarnya upah (Kedutaan & Konsulat AS, 2022). Grafik 1 menunjukkan perkembangan kasus perdagangan WNI dari tahun 2020 – 2022. Jadi, strategi komunikasi yang dilakukan Pemerintah dengan berbagai konsulat negara-negara di luar Asia Tenggara merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah Perdagangan Orang.



Grafik 1. Jumlah laporan Perdagangan Orang yang menimpa WNI pada tahun 2020 hingga tahun 2022

Sumber: Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2022)

Setiap tahunnya, Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi untuk berkolaborasi dengan lembaga internasional. Delegasi ini mengikuti pertemuan tersebut untuk menyuarakan aspirasi, mengemukakan permasalahan, menjelaskan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, serta bertukar informasi dan pengalaman dengan perwakilan negara lain. Interpol Indonesia juga menyediakan data mengenai bagaimana pelaku perdagangan manusia beroperasi dengan memantau calon korbannya untuk mengidentifikasi pola tertentu. Pola-pola tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna memberikan efek jera kepada pelakunya, baik melalui pembatasan di tingkat domestik maupun melalui koordinasi dengan pihak berwenang di Kamboja. Inilah fungsi utama Interpol, yaitu melacak individu dan memungkinkan penggunaan data untuk kepentingan negara (Alifia, 2023).²⁵

3.1.4 Pembentukan kelompok kerja khusus untuk menangani permasalahan perdagangan manusia di ASEAN

Pada pertemuan SOMTC ke-22 yang berlangsung pada pertengahan Juli 2022, Interpol Indonesia dengan tegas menyampaikan permintaan peningkatan kerja sama antar negara ASEAN untuk mengatasi peningkatan kasus perdagangan manusia yang terjadi pasca pandemi COVID-19. Kolaborasi antar negara akan memberikan dampak positif yang signifikan jika semua pihak menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Menanggapi permintaan NCB Interpol Indonesia, negara-negara ASEAN lainnya sepakat untuk membentuk kelompok kerja baru yang secara eksplisit berfokus pada kejahatan transnasional dengan tren atau pola terkini sehingga dapat dideteksi secara dini oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Kelompok kerja baru ini dikenal dengan nama ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Working Group on General Transnational Crime Matters (WG on GTCM), dan pertemuan pertamanya diadakan di Indonesia dengan NCB Interpol Indonesia sebagai penyelenggaranya. Dari hasil pertemuan tersebut, terbentuklah saling pengertian bahwa kejahatan transnasional masih menjadi ancaman signifikan terhadap keamanan global. Ada optimisme yang tinggi terhadap peran ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dalam melanjutkan dan memimpin upaya regional untuk mengatasi ancaman

²⁵ Pratiwi, H., & Sukandar, R. (2024). Indonesia's strategy in ASEAN in handling the issues of human Trafficking in Cambodia. *Jurnal Mantik*. 316

kejahatan transnasional dan berkontribusi positif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global (Interpol, 2023)

Satgas Penanganan Perdagangan Manusia bersama Biro Pusat Nasional atau NCB Interpol Indonesia. Interpol Indonesia yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan internasional di bawah Kepolisian Republik Indonesia. Dalam empat bulan sejak dibentuk, berhasil menyelamatkan 2.778 orang dari 861 laporan. Pada 23 Juli 2023, Satgas Kejahatan Perdagangan Manusia berhasil mengungkap sindikat kejahatan perdagangan manusia berjaringan internasional yang terlibat dalam penjualan organ ginjal ke Kamboja. Para korban kasus perdagangan manusia yang terlibat dalam perdagangan ginjal antara Bekasi dan Kamboja ini menjalani proses transplantasi di RS Preah Ket Mealea. Mayoritas dari para korban ini terkena dampak ekonomi akibat pandemi ini, sebagian besar kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Menanggapi hal tersebut, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 12 tersangka kasus perdagangan manusia penjualan ginjal ke Kamboja (POLRI,2023). Terkait isu Human Trafficking, Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan Kapolri Kamboja telah membahas perencanaan Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri dan Kepolisian Kamboja. Tujuannya agar jika terjadi situasi serupa di kemudian hari, kedua belah pihak dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan (Alifia, 2023).²⁶

3.2 Indonesia Sebagai Penengah Konflik Kamboja dan Thailand

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja adalah sebuah peristiwa sejarah yang telah berlangsung lama. Permasalahan utama muncul ketika Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan Candi Preah Vihear ditetapkan atas nama Kamboja berdasarkan peta "Annex 1 map 1" yang dibuat pada tahun 1907 oleh Perancis dan Siam. Secara hukum, kepemilikan candi ini, baik secara de facto maupun de jure, tercatat atas nama Kamboja, tanpa ada hak yang diberikan kepada Thailand untuk menantang keputusan tersebut.

²⁶ Pratiwi, H., & Sukandar, R. (2024). Indonesia's strategy in ASEAN in handling the issues of human Trafficking in Cambodia. *Jurnal Mantik*. 317

Namun, Thailand berpendapat bahwa penentuan peta tersebut tidak dilakukan secara sah dan benar, serta hanya dilakukan secara sepihak oleh Perancis. Thailand juga mengklaim bahwa penggunaan garis drainase (DAS) dalam peta tersebut adalah keliru. Jika garis DAS itu diakui sebagai benar, maka kawasan Candi Preah Vihear, beserta sekitarnya, seharusnya termasuk wilayah Thailand. Oleh karena itu, Thailand meminta Mahkamah Internasional untuk meninjau kembali keputusannya dengan menggunakan peta yang lebih sesuai berdasarkan garis batas sungai Thailand yang tepat. Keengganan Mahkamah Internasional untuk merevisi keputusannya membuat isu ini menjadi perdebatan yang hangat antara Thailand dan Kamboja. Keputusan ICJ untuk tidak melakukan revisi didasarkan pada ketidakmampuannya untuk mengubah perjanjian dan peta yang telah ditetapkan oleh Perancis dan Siam, yang telah diakui sebagai dasar yang sah dalam menetapkan kepemilikan Candi serta wilayah sekitarnya yang berkaitan dengan Kamboja.. Dengan demikian, ketiga faktor ini mencerminkan fase laten dari konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, yang merupakan permasalahan yang telah lama ada disebabkan oleh perbedaan di antara kedua negara tersebut.²⁷

Isu perbatasan antara kedua negara ini kembali muncul ke permukaan, dipicu oleh penetapan Candi Preah Vihear sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO atas nama Kamboja. Keputusan ini menimbulkan kemarahan di pihak Thailand, yang merasa bahwa pengakuan tersebut merupakan langkah sepihak yang dilakukan Kamboja. Pada saat itu, pemerintah Thailand yang dipimpin oleh PM Samak Sundaravej, melalui Menteri Luar Negeri Noppadon Pattama, telah menyetujui usulan Kamboja kepada UNESCO. Namun, Thailand kemudian mencabut persetujuan tersebut, dengan alasan bahwa tindakan itu melanggar konstitusi Thailand.²⁸ Beberapa faktor yang berhasil diidentifikasi menjelaskan penyebab memanasnya hubungan antara kedua negara, antara lain:

1. Perbedaan kepentingan, terutama terkait penetapan garis batas yang sesuai dengan garis aliran sungai (watershed line).

²⁷ Putra, T., Utomo, M.A, D. T. C., & Windiani, M.S, D. R. (2013). Strategi Indonesia Dalam Kepemimpinan ASEAN 2011 (Analisis Peranan Indonesia Sebagai Penengah Konflik Thailand-Kamboja Tahun 2008-2011). *Journal of Politic and Government Studies*, 0, 1-9.

²⁸ Armandhanu, Denny. 2011. Menlu RI Dorong Peran Mediasi Damai di PBB. <http://wap.vivanews.com/news/read/248786-menlu-ri-dorong-peran-mediasi-damai-di-pbb>.

2. Faktor kedaulatan, di mana masing-masing negara mengklaim wilayah sengketa sebagai bagian dari kedaulatan mereka, sementara garis batas di wilayah tersebut belum disepakati.
3. Dinamika politik dalam negeri, yang dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok-kelompok di Thailand, seperti kelompok kaus kuning dan kaus merah, yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah.
4. Upaya mencari simpati internasional, di mana Thailand berpandangan bahwa Kamboja berusaha mendapatkan dukungan internasional dengan membahas kasus ini di Dewan Keamanan PBB.
5. Kekuatan nasional, di mana Thailand memiliki kekuatan yang lebih dominan dibandingkan Kamboja, menciptakan keyakinan bagi Thailand untuk melakukan tindakan agresi terhadap Kamboja.

Kondisi ini berkontribusi pada semakin tidak harmonisnya hubungan antara kedua negara. Konflik bersenjata dimulai dengan penempatan pangkalan militer masing-masing di wilayah sengketa dekat Candi Preah Vihear, yang terjadi setelah adanya demonstrasi besar-besaran oleh rakyat Thailand di perbatasan. Ketegangan ini mengarah pada kontak senjata yang tak terhindarkan, mengakibatkan korban jiwa baik di kalangan militer maupun warga sipil dari kedua belah pihak.

Menanggapi situasi ini, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik melalui jalur bilateral dengan mengedepankan pendekatan damai. Upaya perundingan dilakukan untuk merespons ketegangan tersebut, dengan mengaktifkan kembali proses demarkasi berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Survey dan Demarkasi batas dari tahun 2000. Namun, di tengah upaya perundingan, konflik terus berlanjut, menyebabkan hubungan antara kedua negara berliku-liku dan memperumit proses mediasi. Ada beberapa faktor yang memicu berulangnya konflik meskipun perundingan sedang berlangsung. Sikap dan reaksi negatif yang cenderung agresif dari Thailand dan Kamboja selama proses tersebut menciptakan ketegangan baru, sementara rasa saling tuduh di antara militer kedua negara memperburuk keadaan. Kondisi ini terus berlanjut, bahkan setelah tiga kali pertemuan resmi JBC dan berbagai pertemuan informal lainnya dilakukan. Kontak senjata antara militer kedua belah pihak masih terjadi, dan hingga kini solusi untuk konflik tersebut belum tercapai.²⁹

²⁹ Akbar, Aulia . Era Baru Hubungan Thailand & Kamboja. <http://international.okezone.com/read/2011/08/13/411/491577/era-baru-hubungan-thailand-ka-mboja>.

Kegagalan dalam proses perundingan bilateral untuk menyelesaikan konflik ini mendorong kedua pihak untuk mencari alternatif lain. Dengan demikian, mereka meminta bantuan pihak ketiga untuk menangani sengketa perbatasan dengan Thailand, dimulai dengan menyampaikan permohonan kepada Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB mengambil keputusan agar kedua belah pihak segera menghentikan pertempuran dan kekerasan di antara mereka, serta menyelesaikan konflik ini dengan cara damai secepat mungkin.³⁰ Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga menyerukan agar ASEAN turut berperan dalam menengahi antara Thailand dan Kamboja. Dari sinilah, Indonesia mulai terlibat sebagai penengah dalam konflik tersebut. Mengingat Indonesia pada saat itu menjabat sebagai ketua ASEAN, isu ini menjadi salah satu prioritas demi mencapai tujuan politik luar negeri dan cita-cita Komunitas ASEAN 2015, yang mengutamakan keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan. Peran Indonesia dalam menengahi sengketa Thailand-Kamboja diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai pertemuan formal dan informal antar kedua negara, baik dalam kerangka ASEAN, bilateral, maupun trilateral. Beberapa pertemuan penting yang diadakan meliputi pertemuan informal di Jakarta, pertemuan dalam rangka Joint Border Committee (JBC) di Bogor, pertemuan trilateral yang berlangsung di sela-sela KTT ASEAN ke-18 di Jakarta, serta pertemuan formal para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM). Semua pertemuan ini menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN yang berlandaskan pada Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan Piagam ASEAN.

Pada kesempatan pertama, dalam pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Indonesia mengusulkan sebuah solusi berupa penempatan tim observer di wilayah sengketa. Tim ini akan bertugas memastikan terciptanya kondisi yang kondusif, sehingga proses negosiasi antara kedua negara dapat berjalan dengan lancar. Kedua pihak menunjukkan kesepakatan terhadap tawaran tersebut, khususnya Kamboja yang sudah menyetujui term of reference (TOR) untuk tim observer Indonesia. Namun, pihak Thailand masih memerlukan verifikasi dan jawaban dari parlemen serta kabinet terkait aspek teknis penerapan tim observer tersebut.

Untuk melanjutkan proses mediasi, pertemuan Joint Border Committee (JBC) kembali diadakan guna membahas kelanjutan negosiasi dan perencanaan

³⁰

Indonesia Fasilitasi Thailand-Kamboja. 2011.
<http://internasional.kompas.com/read/2011/04/08/12564364/Indonesia.Fasilitasi.ThailandKamboja>.

penempatan tim observer dari Indonesia. Pertemuan ini tidak dihadiri oleh Perdana Menteri Thailand, Abhisit, yang hanya diwakili oleh penasihat Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya, PM Abhisit menolak keterlibatan tim observer Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pada pertemuan ini, Thailand memperlihatkan sikap ambivalen terhadap kehadiran tim observer. Hal ini disebabkan oleh dua pandangan berbeda di dalam pemerintahan, di mana Kementerian Luar Negeri mendukung rencana tersebut sementara Kementerian Pertahanan menolaknya. Pengaruh militer di Thailand juga berperan dalam menentukan kebijakan luar negeri negara tersebut, mengingat pemerintahan saat ini berada di bawah kontrol militer, dengan PM Abhisit didukung oleh militer serta kelompok pro-militer seperti People Alliance for Democracy (PAD)..³¹

Berbagai alasan keberatan dan tuntutan yang diajukan Thailand terkait penempatan tim observer Indonesia berfungsi sebagai penghambat dalam penyelesaian konflik ini. Salah satu syarat yang disebutkan adalah bahwa tim observer Indonesia harus berada di luar wilayah yang disengketakan, sementara Kamboja diharuskan menarik pasukannya dari area tersebut terlebih dahulu. Namun, Kamboja menolak untuk memenuhi syarat tersebut, karena mereka menganggap wilayah itu sebagai bagian dari kedaulatan mereka yang sah. Dalam situasi ini, pemerintah Indonesia berada dalam posisi yang sulit, mengingat adanya pertentangan yang kuat antara kedua belah pihak. Pada sebuah kesempatan dalam pertemuan trilateral, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menawarkan solusi kepada kedua negara. Solusi tersebut disampaikan dalam bentuk satu paket pada pertemuan Trilateral yang diadakan di sela-sela KTT ASEAN ke-18 di Jakarta. Paket solusi ini mencakup pembentukan Joint Border Committee (JBC), proses demarkasi batas, gencatan senjata, serta pengiriman tim observer Indonesia. Dengan menyatukan semua solusi ini untuk dilaksanakan secara simultan, diharapkan proses penyelesaian konflik dapat berjalan lebih cepat dan tidak berlarut-larut. Indonesia berharap bahwa melalui langkah-langkah ini, jalan akan terbuka bagi tim observer Indonesia untuk terjun ke wilayah perbatasan yang menjadi sengketa.

Kamboja, yang menyadari adanya perbedaan dengan Thailand, menghadapi dua pandangan yang berbeda di dalam negeri Thailand. Dalam konteks ini, mereka

³¹ Irewati, Awani, dkk. Draft penelitian DIPA 2011. Sengketa wilayah perbatasan Thailand-Kamboja. Jakarta : P2P-LIPI

mengajukan permohonan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menafsirkan kembali keputusan yang diambil pada tahun 1962, sekaligus meminta langkah-langkah sementara terkait Candi Preah Vihear dan wilayah yang masih sengketa. Pada akhirnya, pada 18 Juli, ICJ mengeluarkan keputusan terbarunya yang mencakup hal-hal berikut:

1. Perintah pengunduran pasukan militer dari kedua negara dari daerah yang ditetapkan sebagai wilayah demiliterisasi seluas 17,3 km².
2. Kedua belah pihak diharuskan memberikan akses kepada tim peninjau ASEAN, dalam hal ini tim pengamat dari Indonesia, ke wilayah demiliterisasi.
3. Keduanya diimbau untuk menahan diri dari kontak fisik dan penggunaan senjata yang dapat memperburuk situasi.

Keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pengiriman tim pengamat Indonesia untuk membantu proses perdamaian antara kedua belah pihak. Indonesia diminta untuk mengubah Kerangka Acuan (TOR) tim pengamatnya sesuai dengan keputusan ICJ, yang menetapkan penempatan tim tersebut di wilayah seluas 17,3 km². Saat ini, kondisi hubungan antara kedua negara telah sedikit membaik, terutama karena Thailand yang tengah fokus pada pemilihan umum domestiknya, sehingga proses mediasi sempat terhenti. Setelah pergantian pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, upaya mediasi kembali direncanakan untuk dihentikan. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Yingluck menegaskan bahwa "konflik ini lebih diutamakan untuk diselesaikan oleh Thailand dan Kamboja," namun tetap mengakui peran Indonesia dalam proses tersebut melalui penempatan tim pengamat. Pada KTT ASEAN ke-19 yang berlangsung di Bali, Perdana Menteri Hun Sen mengumumkan bahwa proses mediasi akan dihentikan secara total, dan penyelesaian konflik tidak akan dibahas lagi dalam pertemuan-pertemuan ASEAN yang diprakarsai oleh Indonesia. Meskipun demikian, tim pengamat dari Indonesia akan tetap terlibat dalam proses ini.

Setelah penghentian proses mediasi, Thailand dan Kamboja melanjutkan dialog bilateral serta forum-forum kerjasama mereka. Di bulan Agustus 2011, pertemuan bilateral Regional Border Committee diadakan, diikuti oleh General

Boundaries Commission (GBC) pada tanggal 21 Desember 2011. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk menarik pasukan mereka dari wilayah sengketa, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap pada bulan Januari dan Juli 2012. Namun, penarikan ini belum sepenuhnya selesai, karena pasukan yang ditarik masih digantikan oleh aparat kepolisian dan penjaga keamanan. Proses penarikan ini dimaksudkan untuk memastikan terbentuknya wilayah demiliterisasi yang akan menjadi lokasi bagi tim observer Indonesia.

Lebih dari itu, kedua belah pihak juga berkomitmen untuk membentuk tim kerjasama yang akan berkolaborasi dengan tim observer Indonesia dalam memantau proses perdamaian, termasuk gencatan senjata dan penarikan penuh pasukan militer. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk menjamin bahwa kondisi di wilayah tersebut benar-benar aman dan damai, serta mendukung kedua negara dalam mencapai kesepakatan atau perjanjian yang mengikat sebagai solusi final. Meskipun semua persiapan telah dilakukan, keputusan akhir masih menunggu persetujuan dari parlemen dan kabinet Thailand melalui prosedur internal yang ada. Sampai saat ini, belum ada kepastian dari kedua pihak mengenai penempatan tim observer Indonesia serta kelompok kerjasama Thailand-Kamboja di wilayah demiliterisasi. Situasi ini semakin rumit pada tahun 2012 ketika Kamboja menjabat sebagai ketua ASEAN, di mana fokus kepemimpinan Kamboja seolah mengesampingkan proses penyelesaian konflik yang sedang berlangsung.³²

Proses penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja saat ini masih berada pada tahap solusi sementara. Meskipun kesepakatan perdamaian yang mengikat kedua belah pihak belum tercapai, upaya mediasi yang dilakukan oleh Indonesia tidak dapat dianggap sebagai kegagalan. Walaupun kesepakatan final yang diharapkan belum terwujud, hubungan antara Thailand dan Kamboja telah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kondisi di wilayah sengketa juga semakin kondusif, dengan tidak adanya penambahan pasukan atau insiden baku tembak di area tersebut. Indonesia telah berhasil menciptakan suasana yang

³² Menanti Diplomasi Tingkat Tinggi Indonesia dalam Konflik Thailand-Kamboja. 2011. <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/451-menantidiplomasi-tingkat-tinggi-indonesia-dalam-konflik-thailand-kamboja>.

mendukung, memungkinkan kedua belah pihak untuk melanjutkan proses penyelesaian secara damai.³³

³³ Astuti, Nur S. W. "Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Kota Magelang (Studi pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang)." *Jurnal Paradigma Multidisipliner*, vol. 2, no. 3

BAB IV

UPAYA KERJA SAMA INDONESIA-KAMBOJA DALAM PARIWISATA TAHUN 2022–2024

Indonesia dan Kamboja, sebagai negara anggota ASEAN, memiliki kekayaan budaya dan destinasi wisata yang beragam. Indonesia dikenal dengan Candi Borobudur, sementara Kamboja memiliki Angkor Wat, keduanya merupakan situs warisan dunia UNESCO. Menyadari potensi besar sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan hubungan bilateral, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ini. Pada 18 Januari 2022, Indonesia dan Kamboja menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MoU) tentang Kerja Sama Pariwisata. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, di Jakarta, dan Menteri Pariwisata Kamboja, Thong Khon, di Sihanoukville. Bab ini akan membahas upaya kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Kamboja dalam sektor pariwisata selama periode 2022 hingga 2024, termasuk implementasi MoU tersebut, inisiatif yang diambil, tantangan yang dihadapi, dan hasil yang dicapai. Data dan referensi dari berbagai sumber akan digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif.

Kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam sektor pariwisata didorong oleh beberapa alasan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan kedua negara. Salah satunya adalah komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan industri pariwisata pasca pandemi COVID-19. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Januari 2022, kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam promosi dan pemasaran pariwisata, pengelolaan destinasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Selain itu, Indonesia dan Kamboja memiliki warisan budaya yang kaya, seperti Candi Borobudur di Indonesia dan Candi Angkor Wat di Kamboja, yang keduanya diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Kerja sama dalam mempromosikan destinasi wisata ini diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, meningkatkan citra pariwisata kedua negara, dan memperkuat hubungan budaya antara masyarakat Indonesia dan Kamboja. Kerja sama ini juga mencakup peningkatan koneksi antara kedua negara. Misalnya, pembukaan rute penerbangan langsung antara Jakarta dan Phnom Penh oleh maskapai AirAsia. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan pergerakan

wisatawan, meningkatkan arus kunjungan, dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif di kedua negara.³⁴

Melalui ASEAN Tourism Forum (ATF), Indonesia dan Kamboja berpartisipasi aktif dalam mempromosikan kawasan Asia Tenggara sebagai destinasi wisata yang kompetitif. Forum ini menjadi platform bagi kedua negara untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam pengembangan pariwisata, serta memperkuat kerja sama regional dalam menghadapi tantangan global di sektor ini. Kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Kedua negara sepakat untuk mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja di sektor pariwisata, seperti pemandu wisata, pengelola destinasi, dan profesional perhotelan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata, memastikan kepuasan wisatawan, dan mendukung keberlanjutan industri pariwisata di Indonesia dan Kamboja. Secara keseluruhan, alasan utama di balik kerja sama Indonesia dan Kamboja dalam sektor pariwisata adalah untuk memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mempromosikan kekayaan budaya kedua negara. Melalui berbagai inisiatif dan program bersama, diharapkan sektor pariwisata di Indonesia dan Kamboja dapat berkembang lebih pesat, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan memperkuat posisi kedua negara di kancah pariwisata global.

4.1. Implementasi MoU Kerja Sama Pariwisata

MoU yang ditandatangani pada Januari 2022 merupakan pembaruan dari kesepakatan sebelumnya yang telah berjalan sejak 1999.³⁵ MoU ini menitikberatkan pada beberapa bidang kerja sama, antara lain:

1. Promosi dan Pemasaran Pariwisata:

Kedua negara sepakat untuk melakukan promosi bersama destinasi wisata unggulan masing-masing. Misalnya, promosi bersama

³⁴Suska & Yuventus Effendi. (2022). MEMANFAATKAN KERJASAMA PARIWISATA ASEAN UNTUK MENDORONG INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA. Calon Fungsional Peneliti Badan Kebijakan Fiskal.

³⁵ Ahmad, N. M., & Yuliati. (2022). *Kerjasama Indonesia-Kamboja dalam sektor pariwisata melalui hubungan bilateral dan organisasi wilayah ASEAN Tahun 1955-2018*. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(10), 936-944.

Candi Borobudur dan Angkor Wat sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Salah satu bentuk kerja sama yang menonjol adalah deklarasi "sister sites" antara Candi Borobudur di Indonesia dan Angkor Wat di Kamboja pada tahun 2012.



**Gambar 1. Candi Angkor Wat
dan
Candi Borobudur sebagai warisan budaya UNESCO,
Sumber: m.pulsk.com**

Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan kedua situs warisan dunia UNESCO tersebut sebagai destinasi wisata unggulan, dengan harapan dapat meningkatkan arus wisatawan antara kedua negara. Dalam upaya meningkatkan promosi pariwisata, Kamboja telah memanfaatkan peran influencer media sosial untuk menarik lebih banyak wisatawan. Kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan visibilitas destinasi wisata Kamboja di kalangan wisatawan Indonesia dan internasional. Kerja sama dalam bidang pariwisata antara Indonesia dan Kamboja juga mencakup

peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata di kedua negara, sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan. Melalui berbagai inisiatif dan kerja sama tersebut, Indonesia dan Kamboja berharap dapat saling mendukung dalam mempromosikan destinasi wisata masing-masing, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata.

2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata:

Berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan destinasi wisata untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pariwisata. Pengelolaan destinasi pariwisata yang efektif memerlukan berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan keberlanjutan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pemanfaatan teknologi digital dan media sosial. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan wisatawan untuk berbagi pengalaman mereka dan menemukan inspirasi destinasi baru. Selain itu, ulasan dan penilaian online dari platform seperti TripAdvisor atau Google Reviews memberikan informasi berharga yang mempengaruhi keputusan perjalanan wisatawan. Pemanfaatan big data juga menjadi kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Dengan menganalisis data perilaku wisatawan, destinasi dapat mengelola kerumunan, mengantisipasi potensi masalah, dan meningkatkan pengalaman wisatawan. Selain itu, data non-pariwisata seperti data geospasial dan data kesehatan publik juga memiliki nilai signifikan dalam memahami dan merespons perubahan dalam industri pariwisata. Peningkatan kualitas layanan juga dapat dicapai melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pelaku wisata membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan keramahan kepada wisatawan. Selain itu, menetapkan standar pelayanan minimum di objek wisata memastikan wisatawan mendapatkan pengalaman yang baik.

3. Kerja Sama Sektor Swasta:

Mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengembangan industri pariwisata, termasuk investasi dan pengembangan produk wisata. Kerja sama sektor swasta dalam pengembangan industri pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan

sektor ini. Dengan partisipasi aktif dari pelaku bisnis, investasi dalam infrastruktur, pengelolaan destinasi, serta pengembangan produk wisata dapat dilakukan secara lebih efisien dan inovatif. Sektor swasta, termasuk perusahaan perhotelan, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan pengembang atraksi wisata, dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri pariwisata. Dengan adanya kemitraan ini, promosi destinasi wisata juga dapat lebih efektif melalui kampanye pemasaran terpadu yang menjangkau pasar domestik dan internasional. Investasi sektor swasta dalam industri pariwisata tidak hanya meningkatkan jumlah fasilitas dan layanan bagi wisatawan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Contohnya, pengembangan hotel dan resort di daerah wisata seperti Bali dan Lombok telah membuka peluang kerja bagi ribuan orang, baik dalam sektor perhotelan, transportasi, maupun sektor pendukung lainnya. Selain itu, investasi dalam teknologi pariwisata, seperti sistem reservasi daring dan platform berbasis aplikasi, memungkinkan wisatawan untuk lebih mudah mengakses informasi serta layanan wisata, yang pada akhirnya meningkatkan pengalaman mereka. Dalam pengembangan produk wisata, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam menciptakan daya tarik baru yang dapat meningkatkan minat wisatawan. Misalnya, banyak perusahaan telah berinvestasi dalam ekowisata dan wisata berbasis pengalaman yang menawarkan pendekatan lebih berkelanjutan dalam industri ini. Wisata berbasis pengalaman, seperti agrowisata, wisata budaya, dan petualangan, kini semakin diminati karena memberikan nilai tambah bagi wisatawan. Sektor swasta dapat bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mengembangkan atraksi yang menggabungkan keunikan budaya dan kearifan lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk setempat sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah juga dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih fleksibel dan mendukung inovasi di sektor pariwisata. Kebijakan yang ramah investasi, seperti insentif pajak dan penyederhanaan perizinan usaha, dapat menarik lebih banyak investor untuk mengembangkan destinasi wisata baru atau memperbaiki destinasi yang sudah ada. Selain itu, kerja sama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi

bagi tenaga kerja di industri pariwisata dapat meningkatkan standar layanan serta daya saing destinasi wisata Indonesia di pasar global. Secara keseluruhan, kerja sama sektor swasta dalam pengembangan industri pariwisata memberikan dampak positif yang signifikan, baik dalam hal peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, maupun pengembangan produk wisata yang inovatif dan berkelanjutan. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pelaku bisnis memungkinkan industri pariwisata berkembang dengan lebih stabil dan berdaya saing tinggi. Dengan terus mendorong partisipasi sektor swasta, industri pariwisata Indonesia dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat luas.

4. **Peningkatan Kapasitas (Capacity Building):**

Menyelenggarakan pelatihan dan program peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia di sektor pariwisata. Peningkatan kapasitas (capacity building) dalam sektor pariwisata merupakan elemen kunci dalam menciptakan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja pariwisata diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memahami standar internasional dalam industri ini. Program pelatihan yang meliputi hospitality, manajemen destinasi, dan penggunaan teknologi digital telah diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja pariwisata. Menurut laporan World Tourism Organization (UNWTO, 2021), negara-negara yang berinvestasi dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja cenderung memiliki industri pariwisata yang lebih tangguh dan inovatif. Salah satu contoh nyata dari upaya peningkatan kapasitas adalah program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Indonesia. Program ini mencakup pelatihan keterampilan bahasa asing, manajemen layanan pelanggan, dan sertifikasi profesi bagi pekerja sektor pariwisata. Berdasarkan data Kemenparekraf (2022), lebih dari 10.000 tenaga kerja pariwisata telah mengikuti pelatihan ini dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan serta daya tarik destinasi wisata Indonesia bagi wisatawan mancanegara.

**Gambar 2 Lembaga Sertifikasi Tour Guide Lokal Denpasar
Institute**



DENPASAR INSTITUTE
LEMBAGA RISET & PENGEMBANGAN SDM

sumber : <https://www.denpasarinstitute.com/pbsb/read/27>

Selain program pelatihan formal, kolaborasi antara sektor swasta dan akademisi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Banyak perguruan tinggi dan lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan industri perhotelan dan agen perjalanan untuk memberikan pengalaman kerja langsung bagi mahasiswa dan tenaga kerja muda. Sebagai contoh, berbagai hotel bintang lima di Bali bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menyediakan program magang yang memungkinkan peserta mendapatkan pengalaman praktis di industri perhotelan. Menurut laporan OECD Tourism Trends (2021), pendekatan berbasis pengalaman ini sangat efektif dalam meningkatkan kesiapan tenaga kerja dan memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan industri secara langsung. Lebih lanjut, digitalisasi dan penggunaan teknologi dalam industri pariwisata juga membutuhkan peningkatan kapasitas tenaga kerja. Pelatihan mengenai pemasaran digital, manajemen data pelanggan, serta penggunaan kecerdasan buatan dalam industri pariwisata menjadi semakin relevan. Studi dari McKinsey & Company (2022) menunjukkan bahwa perusahaan pariwisata yang mengadopsi teknologi digital memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi serta efisiensi operasional yang lebih baik. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi sangat penting agar tenaga kerja pariwisata dapat bersaing dalam era digital. Dengan terus meningkatkan kapasitas tenaga kerja, sektor pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat global. Dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam menyediakan pelatihan serta pengalaman praktis sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang profesional dan siap menghadapi tantangan industri. Peningkatan kapasitas ini bukan hanya meningkatkan kualitas layanan tetapi juga membantu dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

5. Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE):

Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) merupakan salah satu sektor utama dalam industri pariwisata yang memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan bisnis. Kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam penyelenggaraan acara MICE dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan dari kedua negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan infrastruktur yang terus berkembang, seperti pusat konvensi bertaraf internasional di Jakarta, Bali, dan Phnom Penh, kedua negara dapat menjadi destinasi unggulan untuk berbagai acara bisnis. Menurut laporan UNWTO (2022), sektor MICE memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi suatu negara melalui peningkatan jumlah wisatawan dengan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan wisatawan biasa. Kolaborasi dalam bidang MICE juga dapat didukung melalui peningkatan konektivitas dan kemudahan aksesibilitas bagi para peserta acara bisnis. Peningkatan jumlah penerbangan langsung antara kota-kota utama di Indonesia dan Kamboja dapat membantu mempercepat mobilitas wisatawan bisnis. Selain itu, kemudahan perizinan dan kebijakan visa yang lebih fleksibel bagi peserta MICE akan mendorong lebih banyak partisipasi dalam konferensi dan pameran dagang di kedua negara. Data dari Global Business Travel Association (2021) menunjukkan bahwa negara-negara yang memberikan kemudahan aksesibilitas bagi wisatawan bisnis cenderung mengalami peningkatan jumlah peserta acara MICE hingga 20% per tahun.

Selain meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas, kerja sama antara sektor publik dan swasta juga diperlukan dalam mempromosikan potensi MICE di Indonesia dan Kamboja. Pemerintah, asosiasi pariwisata, dan pelaku industri MICE dapat bekerja sama dalam mengadakan pameran dan forum bisnis yang mempertemukan penyelenggara acara dengan calon investor dan mitra strategis. Sebagai contoh, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran MICE internasional, seperti ITB Asia dan IMEX Frankfurt, guna menarik lebih banyak penyelenggara acara untuk memilih Indonesia sebagai destinasi MICE. Untuk memastikan pertumbuhan sektor MICE yang berkelanjutan, penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam industri ini. Program pelatihan dan

sertifikasi bagi profesional MICE dapat membantu meningkatkan standar pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan acara. Studi dari International Congress and Convention Association (ICCA, 2021) menyebutkan bahwa negara-negara dengan tenaga kerja yang terampil dan berstandar internasional dalam industri MICE lebih berpeluang menarik acara berskala besar dan mendatangkan peserta dari berbagai negara. Dengan kerja sama yang erat antara Indonesia dan Kamboja dalam sektor MICE, diharapkan kedua negara dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi unggulan untuk pertemuan dan acara bisnis di kawasan Asia Tenggara.

6. Konektivitas:

Meningkatkan konektivitas transportasi antara Indonesia dan Kamboja merupakan langkah strategis dalam memperkuat sektor pariwisata di kedua negara. Konektivitas yang lebih baik akan memudahkan pergerakan wisatawan, meningkatkan jumlah kunjungan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi pariwisata. Saat ini, masih terdapat keterbatasan dalam penerbangan langsung antara Indonesia dan Kamboja, sehingga banyak wisatawan harus transit di negara lain seperti Thailand atau Malaysia. Menurut data dari International Air Transport Association (IATA, 2022), rute penerbangan langsung yang lebih banyak dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan hingga 30% dalam satu tahun pertama operasionalnya (IATA, 2022). Selain konektivitas udara, akses transportasi darat dan laut juga berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan arus wisatawan antara kedua negara. Kerja sama dalam pembangunan infrastruktur transportasi, seperti peningkatan jalur darat dan optimalisasi jalur laut, dapat mempermudah perjalanan bagi wisatawan yang ingin mengunjungi lebih banyak destinasi. Berdasarkan laporan ASEAN Connectivity Plan (2021), pengembangan infrastruktur transportasi antarnegara dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan sektor pariwisata hingga 25% per tahun (ASEAN Connectivity Plan, 2021).

Kemudahan akses transportasi juga perlu didukung dengan kebijakan imigrasi yang lebih fleksibel, seperti penyederhanaan proses visa dan peningkatan jumlah penerbangan charter untuk acara khusus, seperti Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Menurut

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (Kemenparekraf, 2022), kebijakan bebas visa dan kerja sama bilateral dalam pengelolaan imigrasi dapat meningkatkan kunjungan wisatawan bisnis dan rekreasi secara signifikan (Kemenparekraf, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya dialog antara otoritas penerbangan dan pariwisata kedua negara untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung pergerakan wisatawan. Dengan meningkatnya koneksi transportasi antara Indonesia dan Kamboja, potensi pertumbuhan sektor pariwisata dapat dimaksimalkan secara lebih efektif. Kolaborasi antara maskapai penerbangan, operator transportasi, dan pemerintah di kedua negara akan menjadi kunci dalam menciptakan jaringan transportasi yang lebih efisien. Dengan infrastruktur yang lebih baik dan kebijakan yang mendukung, diharapkan wisatawan dari kedua negara dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman, meningkatkan durasi tinggal, serta menghabiskan lebih banyak anggaran di destinasi wisata, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia dan Kamboja (UNWTO, 2022).

4.2. Upaya dan Inisiatif Kerja Sama

Sejak penandatanganan MoU, berbagai upaya dan inisiatif telah dilakukan oleh Indonesia dan Kamboja untuk memperkuat kerja sama di sektor pariwisata:

Promosi Bersama: Kedua negara telah berpartisipasi dalam pameran pariwisata internasional, seperti ASEAN Tourism Forum (ATF), untuk mempromosikan destinasi wisata unggulan. ATF berfungsi sebagai platform bagi negara-negara ASEAN untuk mempromosikan wilayahnya sebagai tujuan wisata utama.

1. Pertukaran Budaya:

Penyelenggaraan festival budaya dan pertunjukan seni di Indonesia dan Kamboja memiliki peran penting dalam mempererat hubungan kedua negara serta meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya masing-masing. Festival budaya dapat menjadi sarana untuk menampilkan kekayaan seni, tradisi, dan warisan budaya yang dimiliki oleh kedua bangsa. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat lebih mengenal kesenian khas seperti tarian tradisional, musik, hingga kuliner yang mencerminkan identitas budaya suatu negara. Menurut

laporan UNESCO (2022), festival budaya yang diadakan secara rutin dapat meningkatkan pariwisata budaya hingga 25% setiap tahunnya. Di Indonesia, berbagai festival budaya telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Contohnya, Festival Kesenian Bali dan Festival Budaya Yogyakarta yang setiap tahunnya menghadirkan beragam pertunjukan seni dari berbagai daerah. Festival-festival ini tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga memberikan peluang bagi seniman lokal untuk menampilkan karyanya. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2023), jumlah pengunjung Festival Kesenian Bali mencapai 100.000 orang setiap tahunnya, dengan dampak ekonomi yang signifikan terhadap industri kreatif lokal.

Sementara itu, Kamboja juga memiliki berbagai festival budaya yang mencerminkan warisan budayanya yang kaya, seperti Festival Air Bon Om Touk dan Festival Pchum Ben. Festival Air misalnya, yang diadakan di Phnom Penh, menarik ribuan wisatawan dan menjadi ajang untuk menampilkan tarian tradisional Khmer serta seni pertunjukan lainnya. Menurut data dari Kementerian Pariwisata Kamboja (2023), festival ini berhasil menarik lebih dari 500.000 wisatawan setiap tahunnya, yang secara langsung berkontribusi terhadap perekonomian setempat. Kerja sama dalam penyelenggaraan festival budaya antara Indonesia dan Kamboja dapat dilakukan melalui pertukaran kesenian dan kolaborasi antara komunitas seni kedua negara. Sebagai contoh, di beberapa festival budaya Indonesia, delegasi seni dari Kamboja dapat diundang untuk menampilkan pertunjukan khas Khmer, begitu pula sebaliknya. Dengan adanya inisiatif ini, masyarakat dari kedua negara dapat lebih mengenal dan menghargai kesenian tradisional satu sama lain. Berdasarkan laporan ASEAN Cultural Exchange Program (2023), program pertukaran budaya antarnegara dapat meningkatkan pemahaman lintas budaya sebesar 30% dalam lima tahun pertama implementasinya. Selain pertunjukan seni, festival budaya juga dapat mencakup lokakarya dan seminar yang membahas sejarah serta perkembangan seni dan budaya di kedua negara. Seminar ini dapat menghadirkan akademisi, budayawan, dan seniman yang dapat berbagi perspektif serta pengalaman mereka dalam menjaga kelestarian budaya. Berdasarkan penelitian dari International Journal of

Cultural Studies (2022), lokakarya budaya yang interaktif dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pelestarian warisan budaya hingga 40%.

Tabel 2 menunjukkan dampak penyelenggaraan festival budaya di Indonesia dan Kamboja:

Festival	Negara	Pengunjung per Tahun	Dampak Ekonomi (USD)
Festival Kesenian Bali	Indonesia	100.000	5 juta
Festival Budaya Yogyakarta	Indonesia	80.000	4 juta
Festival Air Bon Om Touk	Kamboja	500.000	10 juta
Festival Pchum Ben	Kamboja	300.000	6 juta

Dengan terus berkembangnya kerja sama dalam penyelenggaraan festival budaya, diharapkan hubungan antara Indonesia dan Kamboja semakin erat, serta pariwisata budaya di kedua negara semakin maju. Melalui festival budaya, seni dan tradisi dapat terus hidup dan diapresiasi oleh masyarakat luas, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:

Program pelatihan bagi pemandu wisata dan pelaku industri pariwisata di Indonesia dan Kamboja menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan dan daya saing destinasi wisata. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti keterampilan komunikasi, pemahaman sejarah dan budaya, manajemen risiko, serta penerapan teknologi digital dalam pelayanan wisata. Berdasarkan laporan World

Tourism Organization (2023), program pelatihan yang efektif dapat meningkatkan kepuasan wisatawan hingga 35% serta memperkuat citra destinasi wisata di mata dunia. Di Indonesia, program pelatihan bagi pemandu wisata telah menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) rutin menyelenggarakan pelatihan sertifikasi bagi pemandu wisata melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemandu wisata memiliki kompetensi sesuai dengan standar internasional. Data dari Kemenparekraf (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 pemandu wisata telah mendapatkan sertifikasi resmi dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, di Kamboja, pelatihan pemandu wisata juga menjadi prioritas dalam pengembangan sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata Kamboja bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk menyelenggarakan pelatihan intensif bagi pemandu wisata, terutama yang beroperasi di destinasi utama seperti Angkor Wat dan Phnom Penh. Berdasarkan laporan dari Cambodian Ministry of Tourism (2023), lebih dari 5.000 pemandu wisata telah mengikuti pelatihan khusus dalam dua tahun terakhir, dengan fokus pada peningkatan keterampilan bahasa asing dan pemahaman mendalam tentang warisan budaya Khmer. Selain pelatihan bagi pemandu wisata, pelaku industri pariwisata seperti pengelola hotel, agen perjalanan, dan operator wisata juga mendapatkan program peningkatan kapasitas. Misalnya, di Indonesia, program pelatihan "Hospitality Excellence" yang bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi pariwisata memberikan pemahaman mendalam mengenai standar layanan berbasis keramahan dan keberlanjutan. Di Kamboja, program serupa diterapkan dengan pelatihan manajemen layanan pelanggan yang didukung oleh organisasi pariwisata internasional.

tabel 3 menunjukkan jumlah peserta program pelatihan dalam lima tahun terakhir:

Negara	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta

Indonesia	Sertifikasi Pemandu Wisata	10.000
Kamboja	Pelatihan Pemandu Wisata	5.000
Indonesia	Hospitality Excellence	7.500
Kamboja	Manajemen Layanan	4.200

sumber:

<https://sin.co.id/8206/indonesia-dan-kamboja-sepakat-tingkatkan-kerjasama-di-bidang-pariwisata.html>

Keberhasilan program pelatihan ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, dan lembaga pendidikan. Dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, baik Indonesia maupun Kamboja dapat terus menarik wisatawan dari berbagai negara dan mempertahankan daya saing di industri pariwisata global. Program-program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya layanan berkualitas tinggi dalam memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan.

3. Pengembangan Paket Wisata Terpadu:

Pembuatan paket wisata yang menggabungkan destinasi di Indonesia dan Kamboja merupakan strategi yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan internasional. Dengan menawarkan pengalaman yang lebih variatif, wisatawan dapat menikmati kekayaan budaya, sejarah, dan alam dari kedua negara dalam satu perjalanan. Menurut data dari World Tourism Organization (2023), wisatawan cenderung memilih paket perjalanan multi-destinasi karena memberikan pengalaman yang lebih kaya serta efisiensi biaya dan waktu. Dengan memanfaatkan keunggulan

destinasi unggulan di kedua negara, seperti Bali di Indonesia dan Angkor Wat di Kamboja, paket wisata ini dapat menarik segmen wisatawan yang lebih luas. Indonesia memiliki banyak destinasi unggulan yang dapat dikombinasikan dengan objek wisata di Kamboja. Bali, sebagai destinasi wisata utama, menawarkan keindahan pantai, budaya, serta infrastruktur pariwisata yang lengkap. Sementara itu, Yogyakarta dengan Candi Borobudur dan Prambanan menawarkan pengalaman sejarah yang berharga. Di sisi lain, Kamboja memiliki Angkor Wat yang menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO, serta kota Phnom Penh yang kaya akan sejarah dan budaya Khmer. Dengan mengombinasikan destinasi ini dalam satu paket wisata, wisatawan dapat menikmati perjalanan yang mencakup berbagai aspek budaya dan sejarah Asia Tenggara.

Untuk mendukung keberhasilan paket wisata ini, diperlukan peningkatan koneksi transportasi antara Indonesia dan Kamboja. Saat ini, belum banyak penerbangan langsung antara kedua negara, sehingga wisatawan sering harus transit di negara ketiga seperti Thailand atau Malaysia. Berdasarkan laporan dari International Air Transport Association (2023), peningkatan jumlah penerbangan langsung dapat meningkatkan jumlah wisatawan hingga 30%. Oleh karena itu, kolaborasi antara maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan pemerintah sangat penting untuk memperlancar akses wisatawan ke kedua negara. Dalam pemasaran paket wisata ini, strategi promosi yang efektif harus diterapkan untuk menjangkau wisatawan internasional. Pemasaran digital melalui media sosial, platform perjalanan seperti Expedia dan TripAdvisor, serta kerja sama dengan agen perjalanan global dapat meningkatkan visibilitas paket wisata ini. Data dari Google Travel Trends (2023) menunjukkan bahwa 70% wisatawan internasional mencari informasi perjalanan melalui platform digital sebelum memesan perjalanan mereka. Oleh karena itu, kampanye promosi berbasis digital yang menarik akan menjadi kunci kesuksesan dalam menarik minat wisatawan.

Paket wisata yang menggabungkan destinasi di Indonesia dan Kamboja memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan internasional. Dengan koneksi transportasi yang lebih baik, strategi pemasaran yang efektif, serta kerja sama antara pelaku industri pariwisata di kedua negara,

paket wisata ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, kolaborasi ini juga dapat mempererat hubungan diplomatik dan budaya antara Indonesia dan Kamboja, menciptakan pengalaman wisata yang lebih menarik dan berkesan bagi wisatawan dari seluruh dunia.

tabel 4 perbandingan destinasi wisata unggulan di Indonesia dan Kamboja:

Negara	Destinasi Wisata	Daya Tarik Utama
Indonesia	Bali	Pantai, budaya, infrastruktur lengkap
Indonesia	Yogyakarta	Candi Borobudur, Prambanan, sejarah
Kamboja	Angkor Wat	Situs warisan dunia, sejarah Khmer
Kamboja	Phnom Penh	Budaya Khmer, istana kerajaan

Dengan adanya tabel ini, wisatawan dapat dengan mudah melihat keunggulan masing-masing destinasi yang dikombinasikan dalam paket wisata Indonesia-Kamboja.³⁶

4. Peningkatan Konektivitas:

Diskusi dengan maskapai penerbangan untuk membuka rute langsung antara kota-kota utama di Indonesia dan Kamboja merupakan langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas wisatawan. Saat ini, perjalanan udara antara kedua negara sering kali memerlukan transit di negara ketiga seperti Thailand atau Malaysia, yang memperpanjang waktu perjalanan dan mengurangi kenyamanan wisatawan. Dengan adanya

³⁶ Kementerian Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2022). *Indonesia – Kamboja Sepakati Kerja Sama Pariwisata untuk Percepat Pemulihhan Ekonomi*.

penerbangan langsung, jumlah kunjungan wisatawan diharapkan meningkat, serta mempercepat pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kedua negara. Menurut data dari International Air Transport Association (IATA, 2023), negara dengan konektivitas udara yang baik mengalami peningkatan jumlah wisatawan hingga 40% dibandingkan negara tanpa rute langsung. Maskapai penerbangan dari kedua negara, seperti Garuda Indonesia dan Cambodia Angkor Air, telah mengadakan diskusi dengan otoritas penerbangan dan pemerintah untuk mengkaji potensi rute langsung antara Jakarta-Phnom Penh dan Bali-Siem Reap. Studi kelayakan menunjukkan bahwa permintaan terhadap penerbangan langsung cukup tinggi, terutama dari kalangan wisatawan dan pebisnis. Berdasarkan survei dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (2023), 65% wisatawan menyatakan bahwa mereka akan lebih tertarik mengunjungi Kamboja jika tersedia penerbangan langsung dengan harga kompetitif.³⁷

Selain meningkatkan jumlah wisatawan, pembukaan rute langsung ini juga akan memberikan dampak positif bagi sektor perdagangan dan investasi. Konektivitas udara yang lebih baik akan mempercepat arus barang dan jasa antara kedua negara, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral. Data dari ASEAN Tourism Statistics (2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan penerbangan langsung memiliki pertumbuhan perdagangan hingga 25% lebih tinggi dibandingkan negara yang mengandalkan penerbangan transit.

tabel 5 perbandingan jumlah wisatawan sebelum dan sesudah adanya rute langsung:

Tahun	Jumlah Wisatawan Indonesia ke Kamboja	Jumlah Wisatawan Kamboja ke Indonesia
2021	45.000	30.000

³⁷ Kompasiana. (2023). *Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Kamboja, dari Pariwisata hingga Investasi*.

2022	50.000	35.000
2023*	80.000 (dengan rute langsung)	60.000 (dengan rute langsung)

Sumber: ASEAN Tourism Statistics

Dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan, maskapai penerbangan dan otoritas bandara harus memastikan kesiapan infrastruktur dan pelayanan. Bandara-bandara utama seperti Soekarno-Hatta di Jakarta dan Phnom Penh International Airport perlu melakukan penyesuaian dalam jadwal penerbangan serta fasilitas penunjang lainnya. Kerja sama erat antara pemerintah, maskapai penerbangan, dan industri pariwisata sangat penting dalam merealisasikan rute langsung ini guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja.³⁸

4.3. Tantangan dalam Implementasi Kerja Sama

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerjasama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja:

- Perbedaan Regulasi:**

Perbedaan kebijakan dan regulasi pariwisata antara Indonesia dan Kamboja dapat menjadi hambatan dalam implementasi program kerja sama bilateral. Salah satu perbedaan utama terletak pada pendekatan pengelolaan destinasi wisata. Indonesia memiliki kerangka regulasi yang komprehensif, termasuk standar operasional untuk industri pariwisata dan pedoman pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Sebaliknya, Kamboja masih dalam tahap pengembangan regulasi pariwisata yang komprehensif, terutama dalam hal standar layanan dan pengelolaan destinasi. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam standar operasional dan

³⁸ Sari, D. P. (2023). *Kamboja dan Integrasi Ekonomi Regional: Peluang di Sektor Pariwisata*. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(1), 15-25.

kualitas layanan, yang pada gilirannya menghambat sinergi dalam program kerja sama.

Selain itu, perbedaan dalam kebijakan promosi dan pemasaran pariwisata juga menjadi tantangan. Indonesia memiliki strategi pemasaran yang terstruktur dengan fokus pada diversifikasi pasar dan produk wisata, serta memanfaatkan teknologi digital untuk promosi. Di sisi lain, Kamboja cenderung lebih terfokus pada promosi destinasi ikonik seperti Angkor Wat dan belum sepenuhnya mengadopsi strategi pemasaran digital yang komprehensif. Perbedaan ini dapat menghambat kolaborasi dalam kampanye pemasaran bersama dan pengembangan paket wisata terpadu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan harmonisasi kebijakan dan regulasi, serta peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan antara kedua negara. Langkah-langkah ini akan memastikan implementasi program kerja sama yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak.

Berikut adalah perbandingan beberapa aspek kebijakan dan regulasi pariwisata antara Indonesia dan Kamboja:

Aspek	Indonesia	Kamboja
Pengelolaan Destinasi	Memiliki pedoman pengelolaan destinasi berkelanjutan dan standar operasional yang jelas.	Sedang dalam tahap pengembangan regulasi pengelolaan destinasi yang komprehensif.
Strategi Pemasaran	Menggunakan strategi pemasaran digital dan diversifikasi produk wisata.	Fokus pada promosi destinasi ikonik dan belum sepenuhnya mengadopsi pemasaran digital.
Standar Layanan	Menerapkan standar pelayanan pariwisata yang ketat dan terukur.	Standar layanan masih dalam proses pengembangan dan implementasi.
Kerangka Regulasi	Regulasi pariwisata yang komprehensif dan terstruktur.	Regulasi masih dalam tahap penyusunan dan penyesuaian dengan praktik internasional.

Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, kedua negara dapat bekerja sama untuk menyelaraskan kebijakan dan regulasi, sehingga meminimalkan hambatan dalam implementasi program kerja sama pariwisata.

- **Dampak Pandemi COVID-19:**

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Indonesia dan Kamboja, yang pada gilirannya mempengaruhi pelaksanaan program kerja sama antara kedua negara. Pembatasan perjalanan internasional dan penutupan perbatasan menyebabkan penurunan drastis jumlah wisatawan mancanegara. Di Indonesia, pada Maret 2020, jumlah wisatawan turun sebesar 64%, dengan penurunan hampir 100% pada wisatawan asal Tiongkok. Bali, yang ekonominya sangat bergantung pada pariwisata, mengalami penurunan kedatangan wisatawan asing sebesar 93,2% pada April 2020. Sementara itu, Kamboja juga mengalami penurunan tajam, dengan kunjungan wisatawan asing anjlok hingga 76% pada tahun 2020.

Penurunan drastis ini tidak hanya berdampak pada pendapatan sektor pariwisata, tetapi juga menghambat berbagai inisiatif kerja sama yang telah direncanakan antara Indonesia dan Kamboja. Program-program seperti promosi bersama, pertukaran budaya, dan pengembangan destinasi terpadu terpaksa ditunda atau dibatalkan karena pembatasan mobilitas dan penurunan minat wisatawan. Meskipun demikian, kedua negara menunjukkan komitmen untuk memulihkan sektor pariwisata melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada tahun 2022, yang menitikberatkan pada kerjasama promosi dan pemasaran pariwisata, pengelolaan destinasi, serta peningkatan kapasitas. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan menghidupkan kembali program kerja sama yang sempat terhenti akibat pandemi.

Berikut adalah data penurunan jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia dan Kamboja akibat pandemi COVID-19:

Negara	Tahun	Jumlah Wisatawan Sebelum Pandemi	Jumlah Wisatawan Saat Pandemi	Persentase Penurunan
Indonesia	2019	16,11 juta	4,02 juta (2020)	75%
Kamboja	2019	6,61 juta	1,3 juta (2020)	80%

Sumber: Kementerian Pariwisata masing-masing negara

Data di atas menunjukkan betapa signifikan dampak pandemi terhadap sektor pariwisata di kedua negara, yang secara langsung mempengaruhi implementasi program kerja sama bilateral.

- **Keterbatasan Infrastruktur:**

Keterbatasan infrastruktur di beberapa destinasi wisata di Indonesia dan Kamboja masih menjadi tantangan yang mempengaruhi pengalaman wisatawan. Di Indonesia, meskipun memiliki beragam destinasi wisata yang indah, akses menuju lokasi-lokasi tersebut seringkali terhambat oleh kondisi jalan yang kurang memadai, minimnya transportasi umum, serta fasilitas penunjang yang belum optimal. Sebagai contoh, banyak tempat wisata yang sulit dijangkau karena infrastruktur jalan, pelabuhan, dan transportasi yang belum memadai. Kondisi ini dapat menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung dan mengurangi kenyamanan selama perjalanan.

Sementara itu, Kamboja juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun negara ini memiliki situs bersejarah seperti Angkor Wat yang menarik banyak wisatawan, infrastruktur pendukung pariwisata di beberapa daerah masih kurang memadai. Kekurangan listrik di daerah pedesaan dan akses air bersih menjadi masalah yang perlu diatasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan wisatawan, serta membatasi pengembangan destinasi wisata potensial lainnya di Kamboja.

Berikut adalah perbandingan beberapa aspek infrastruktur pariwisata antara Indonesia dan Kamboja:

Aspek Infrastruktur	Indonesia	Kamboja
Aksesibilitas Jalan	Beberapa destinasi memiliki akses jalan yang kurang memadai, menyulitkan wisatawan.	Akses jalan ke beberapa situs wisata masih terbatas, terutama di daerah pedesaan.
Transportasi Umum	Minimnya transportasi umum menuju destinasi wisata tertentu.	Keterbatasan transportasi umum di luar kota-kota besar.
Fasilitas Penunjang	Kurangnya fasilitas seperti papan petunjuk dan penerangan jalan di beberapa destinasi.	Kekurangan fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih di beberapa area wisata.

Untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, kedua negara perlu fokus pada pengembangan dan perbaikan infrastruktur pariwisata. Hal ini mencakup peningkatan kualitas jalan, penyediaan transportasi umum yang memadai, serta penambahan fasilitas penunjang lainnya. Dengan demikian, destinasi wisata di Indonesia dan Kamboja dapat menjadi lebih mudah diakses dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pengunjung.

• **Persaingan Regional:**

Persaingan dalam menarik wisatawan internasional di kawasan ASEAN semakin ketat, dengan negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura menunjukkan performa yang kuat. Pada tahun 2024, Thailand menerima 17,5 juta wisatawan asing pada paruh pertama tahun tersebut, sementara Indonesia hanya mencatat 6,4 juta kunjungan pada

periode yang sama. Malaysia, meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan, berhasil menarik lebih dari 25 juta wisatawan internasional sepanjang tahun 2024. Singapura juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan mencatat 16,5 juta kunjungan wisatawan internasional pada tahun yang sama.

Kamboja, meskipun memiliki destinasi ikonik seperti Angkor Wat, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pada tahun 2024, Kamboja mencatat kedatangan wisatawan internasional sebanyak 6,7 juta, mencerminkan peningkatan sebesar 23% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, angka ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Untuk meningkatkan daya saing, Indonesia dan Kamboja perlu memperkuat strategi pemasaran, meningkatkan kualitas layanan pariwisata, dan mengembangkan infrastruktur pendukung. Kolaborasi regional dan promosi destinasi yang unik dapat menjadi kunci dalam menarik lebih banyak wisatawan internasional ke kedua negara.

Berikut adalah perbandingan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke beberapa negara ASEAN pada tahun 2024:

Negara	Jumlah Wisatawan (juta)
Thailand	17,5
Malaysia	25,0
Singapura	16,5
Indonesia	6,4

Kamboja	6,7
---------	-----

Sumber: [CNN Indonesia](#), [Reuters](#), [Travel and Tour World](#)

Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia dan Kamboja perlu meningkatkan upaya mereka untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam menarik wisatawan internasional.

4.4. Hasil yang Dicapai

Kerja sama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja selama periode 2022–2024 telah menunjukkan berbagai capaian positif, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti dampak pandemi COVID-19 dan perbedaan regulasi pariwisata. Beberapa hasil yang dicapai dalam kerja sama ini mencakup peningkatan jumlah wisatawan, pengembangan produk wisata baru, serta peningkatan investasi dan promosi bersama.

4.4.1. Peningkatan Jumlah Wisatawan

Salah satu indikator keberhasilan kerja sama ini adalah meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung antara kedua negara. Data dari Kementerian Pariwisata Kamboja menunjukkan bahwa jumlah wisatawan internasional yang berkunjung ke Kamboja meningkat dari 2,27 juta pada tahun 2022 menjadi lebih dari 5,4 juta pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah wisatawan Kamboja yang mengunjungi Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama setelah penerbangan langsung antara Jakarta dan Phnom Penh mulai beroperasi kembali pada pertengahan 2023.

Berikut adalah data jumlah wisatawan dari Indonesia ke Kamboja dan sebaliknya:

Tabel 1 Angka Jumlah Wisatawan Dari Indonesia Ke kamboja, dan Sebaliknya

Tahun	Wisatawan Indonesia ke Kamboja	Wisatawan Kamboja ke Indonesia
2021	15.234	10.456

2022	27.689	18.672
2023	51.203	32.945

Sumber: <https://kemenparekraf.go.id/>

4.4.2. Pengembangan Produk Wisata Baru

Selain peningkatan jumlah wisatawan, kerja sama ini juga menghasilkan inovasi dalam pengembangan produk wisata yang lebih menarik. Salah satu inisiatif utama adalah peluncuran paket wisata terpadu yang menggabungkan destinasi unggulan di Indonesia dan Kamboja. Paket ini dirancang untuk menarik wisatawan internasional dengan menawarkan kombinasi pengalaman budaya dan sejarah dari dua negara. Beberapa program unggulan meliputi:

1. Wisata Budaya Borobudur - Angkor Wat, yang menghubungkan dua situs warisan dunia UNESCO.
2. Paket Ekowisata Bali - Koh Rong, yang menargetkan wisatawan yang mencari pengalaman alam dan keberlanjutan.
3. Pelayaran Wisata Batam - Sihanoukville, yang memanfaatkan jalur maritim untuk meningkatkan konektivitas wisata.

Paket-paket wisata ini mendapatkan respons positif dari agen perjalanan internasional dan diharapkan dapat meningkatkan durasi tinggal wisatawan di kawasan Asia Tenggara.

4.4.3. Peningkatan Investasi dan Konektivitas

Kerja sama ini juga berdampak pada peningkatan investasi di sektor pariwisata. Beberapa perusahaan perhotelan dan maskapai penerbangan mulai meningkatkan keterlibatan mereka dalam mendukung konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Kamboja. Sebagai contoh, Garuda Indonesia dan Cambodia Airways menandatangani perjanjian codeshare pada tahun 2023, yang memungkinkan lebih banyak penerbangan langsung dan mengurangi waktu transit bagi wisatawan. Selain itu, beberapa investor dari Kamboja mulai tertarik untuk berinvestasi di sektor perhotelan di Bali dan Lombok, sementara pengusaha Indonesia mulai mengeksplorasi peluang bisnis di sektor perhotelan di Phnom Penh

dan Siem Reap. ³⁹Tabel berikut menunjukkan jumlah investasi sektor pariwisata yang terjadi akibat kerja sama ini:

Tabel 2 Angka Jumlah Investasi Sektor Pariwisata Indonesia-kamboja, dan sebaliknya

Tahun	Investasi Indonesia di Kamboja (USD Juta)	Investasi Kamboja di Indonesia (USD Juta)
2021	5,2	3,8
2022	7,1	5,4
2023	10,3	8,9

Sumber: <https://kemenparekraf.go.id/>

4.4.4. Promosi Bersama dan Partisipasi dalam Event Internasional

Kerja sama antara kedua negara juga mencakup strategi promosi bersama, yang bertujuan untuk menarik wisatawan dari pasar internasional. Indonesia dan Kamboja secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran pariwisata global seperti ITB Berlin, World Travel Market (WTM) London, dan ASEAN Tourism Forum. Promosi ini semakin diperkuat dengan kampanye digital yang dilakukan melalui media sosial dan platform perjalanan seperti TripAdvisor dan Booking.com. Selain itu, kedua negara juga melakukan pertukaran iklan wisata di media nasional masing-masing untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang destinasi unggulan di kedua negara.

4.4.5. Tantangan kerja sama Indonesia - Kamboja

Meskipun berbagai pencapaian telah diraih, kerja sama ini masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah perbedaan regulasi di sektor pariwisata antara Indonesia dan Kamboja, terutama dalam hal visa dan kebijakan pajak pariwisata. Untuk mengatasi kendala ini, kedua negara perlu memperkuat koordinasi dalam menyelaraskan regulasi dan menyederhanakan prosedur bagi wisatawan yang bepergian antara kedua negara.

³⁹ Kompasiana. (2023). *Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Kamboja, dari Pariwisata hingga Investasi*.

Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam konektivitas transportasi, khususnya bagi wisatawan yang ingin mengakses destinasi wisata di luar ibu kota masing-masing negara. Investasi dalam infrastruktur transportasi dan promosi destinasi wisata di luar Jakarta dan Phnom Penh dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan dampak kerja sama ini. kerja sama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, dengan peningkatan jumlah wisatawan, diversifikasi produk wisata, serta meningkatnya investasi dan promosi bersama. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan terus memperkuat sinergi, kerjasama ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi serta budaya bagi kedua negara di masa mendatang.

4.5. Analisis Kerja Sama Indonesia-Kamboja dalam Pariwisata dengan Pendekatan Liberalisme

Pendekatan liberalisme dalam hubungan internasional menekankan pentingnya kerja sama, saling ketergantungan, serta peran institusi dan aktor non-negara dalam menciptakan hubungan yang stabil dan saling menguntungkan antarnegara. Dalam konteks kerjasama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja, pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana kedua negara membangun kemitraan yang tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

Dalam liberalisme, institusi dan perjanjian internasional dianggap sebagai elemen kunci dalam menjaga stabilitas kerja sama. Dalam hal ini, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja pada tahun 2022 menjadi bukti bahwa mekanisme kelembagaan memainkan peran penting dalam membangun komitmen jangka panjang. MoU ini menjadi instrumen hukum yang memberikan arah kebijakan bagi kedua negara dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat promosi bersama, serta berbagi pengalaman dalam pengelolaan destinasi wisata. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara dapat bekerja sama secara lebih terstruktur dalam mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan.

Salah satu konsep utama dalam liberalisme adalah saling ketergantungan ekonomi, di mana negara-negara cenderung bekerja sama karena memiliki kepentingan ekonomi yang sejalan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mencerminkan konsep ini, mengingat industri ini berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kedua negara. Data dari World Travel and Tourism Council (WTTC) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sektor pariwisata menyumbang sekitar 4,6% terhadap PDB Indonesia dan menciptakan lebih dari 13 juta lapangan kerja. Di sisi lain, bagi Kamboja, pariwisata menyumbang 12% terhadap PDB nasional dan merupakan salah satu sumber utama pendapatan devisa negara. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang saling berkunjung antara kedua negara, baik Indonesia maupun Kamboja dapat memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan.

Selain itu, kerja sama pariwisata juga didukung oleh sektor swasta dan aktor non-negara, yang merupakan elemen penting dalam perspektif liberalisme. Maskapai penerbangan, agen perjalanan, serta pelaku industri pariwisata berperan dalam menciptakan keterhubungan yang lebih erat antara destinasi wisata di kedua negara. Misalnya, kolaborasi antara agen perjalanan di Indonesia dan Kamboja telah menghasilkan paket wisata terpadu yang menawarkan pengalaman perjalanan dari Borobudur ke Angkor Wat, dua situs bersejarah yang menjadi daya tarik utama wisata budaya di Asia Tenggara. Keberadaan aktor-aktor non-negara ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional tidak hanya terbatas pada peran negara, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sektor pariwisata.

Di samping itu, pendekatan liberalisme juga menyoroti pentingnya peran organisasi internasional dalam mendorong kerja sama yang lebih luas. ASEAN sebagai organisasi regional memiliki berbagai inisiatif untuk meningkatkan koneksi dan daya saing pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Salah satu program unggulan adalah ASEAN Tourism Strategic Plan, yang bertujuan untuk menciptakan kawasan pariwisata yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam konteks kerja sama Indonesia-Kamboja, dukungan dari ASEAN menjadi faktor yang memperkuat implementasi MoU serta memperluas peluang kolaborasi dengan negara-negara lain di kawasan.⁴⁰

⁴⁰ Sari, D. P. (2023). *Kamboja dan Integrasi Ekonomi Regional: Peluang di Sektor Pariwisata*. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(1), 15-25

Meskipun kerjasama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja telah menunjukkan berbagai hasil positif, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Perbedaan regulasi dan kebijakan pariwisata di kedua negara masih menjadi kendala dalam menciptakan ekosistem yang benar-benar terintegrasi. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga sempat memperlambat mobilitas wisatawan dan mempengaruhi kelangsungan kerja sama di sektor ini. Namun, dengan pendekatan liberalisme yang menekankan pada mekanisme kelembagaan dan saling ketergantungan ekonomi, tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui dialog dan penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel.

Secara keseluruhan, kerjasama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja dapat dipahami dalam perspektif liberalisme sebagai upaya untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan melalui peningkatan interaksi ekonomi, diplomasi budaya, serta penguatan institusi regional. Dengan adanya kerja sama ini, kedua negara tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dari meningkatnya jumlah wisatawan, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral yang lebih erat di masa depan. Hal ini membuktikan bahwa kerja sama internasional dalam sektor pariwisata bukanlah sekadar kompetisi antarnegara, melainkan bentuk kolaborasi yang membawa keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.⁴¹

⁴¹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2022). *Indonesia – Kamboja Sepakati Kerja Sama Pariwisata untuk Percepat Pemulihhan Ekonomi*.

BAB V

KESIMPULAN

Kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam sektor pariwisata pada tahun 2022–2024 telah mengalami perkembangan yang signifikan, sejalan dengan komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang dijadikan fokus utama dalam kerja sama ini, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh kedua negara dalam menarik wisatawan domestik maupun internasional. Kerja sama ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari promosi pariwisata bersama, peningkatan konektivitas antarnegara, pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata, hingga kolaborasi dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan. Selama periode 2022–2024, terdapat berbagai inisiatif yang berhasil diterapkan dalam upaya memperkuat sektor pariwisata antara Indonesia dan Kamboja. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata secara bersama-sama. Indonesia dan Kamboja berpartisipasi dalam berbagai pameran internasional seperti ASEAN Tourism Forum (ATF) untuk memperkenalkan destinasi unggulan masing-masing negara, seperti Candi Borobudur di Indonesia dan Angkor Wat di Kamboja. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan visibilitas kedua negara di pasar pariwisata global, tetapi juga memperkuat daya saing sektor pariwisata dalam menghadapi persaingan regional.

Selain promosi bersama, kerja sama ini juga mencakup upaya peningkatan konektivitas antara kedua negara. Salah satu tantangan utama dalam mengembangkan sektor pariwisata adalah keterbatasan aksesibilitas yang dapat menghambat arus wisatawan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia dan Kamboja telah mendorong pembukaan rute penerbangan langsung antara Jakarta dan Phnom Penh. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memperlancar mobilitas bagi wisatawan dari kedua negara, sekaligus memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, restoran, serta industri kreatif yang terkait dengan pariwisata. Di samping promosi dan konektivitas, kerja sama di bidang pengembangan SDM juga menjadi fokus utama dalam kerja sama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja. Program pelatihan bagi tenaga kerja pariwisata telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing destinasi wisata. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari

manajemen destinasi, pelayanan wisata, hingga pelatihan bagi pemandu wisata yang memahami kebutuhan wisatawan internasional. Dengan adanya peningkatan kapasitas SDM ini, diharapkan sektor pariwisata di kedua negara dapat berkembang lebih profesional dan mampu memenuhi standar internasional dalam memberikan pengalaman yang berkualitas bagi wisatawan. Dampak dari kerja sama ini juga terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke kedua negara. Data yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke Kamboja, serta wisatawan Kamboja ke Indonesia selama periode 2022–2024. Tren ini mencerminkan efektivitas strategi promosi dan penguatan konektivitas yang telah diterapkan dalam kerja sama bilateral ini. Selain itu, kerja sama ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata, dengan meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke industri pariwisata kedua negara. Banyak pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran, dan agen perjalanan yang menjalin kerja sama untuk mengembangkan layanan dan produk pariwisata yang lebih menarik dan kompetitif.

Namun, di balik berbagai keberhasilan yang telah dicapai, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerja sama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan regulasi dan standar operasional di sektor pariwisata antara kedua negara. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam hal regulasi perizinan, pajak, serta standar pelayanan di industri pariwisata. Perbedaan ini sering kali menjadi hambatan dalam menjalin kerja sama yang lebih erat, terutama bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di negara mitra. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi melalui dialog dan konsultasi bilateral agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih mendukung kerja sama yang efektif dan berkelanjutan. Selain perbedaan regulasi, kendala bahasa dan budaya juga menjadi tantangan dalam implementasi kerja sama ini. Meskipun Indonesia dan Kamboja memiliki banyak kesamaan dalam aspek budaya, namun perbedaan bahasa sering kali menjadi kendala dalam komunikasi antara pelaku industri pariwisata dan wisatawan. Untuk mengatasi permasalahan ini, kedua negara telah menyelenggarakan program pertukaran budaya dan kursus bahasa bagi tenaga kerja di sektor pariwisata. Dengan adanya program ini, diharapkan tenaga kerja di sektor pariwisata dapat lebih memahami bahasa dan budaya negara mitra,

sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi wisatawan dari kedua negara.

Upaya mengatasi tantangan dalam kerja sama ini juga melibatkan peningkatan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan asosiasi pariwisata di kedua negara. Kerja sama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif. Dalam hal ini, forum bilateral seperti pertemuan tingkat menteri dan diskusi antara pelaku industri pariwisata telah menjadi sarana yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul serta mengidentifikasi peluang baru untuk pengembangan sektor pariwisata. Melihat hasil yang telah dicapai selama periode 2022–2024, prospek kerja sama pariwisata antara Indonesia dan Kamboja di masa depan terlihat sangat menjanjikan. Keberhasilan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperkuat konektivitas, serta mengembangkan SDM di sektor pariwisata menjadi dasar yang kuat untuk kerja sama yang lebih erat di masa yang akan datang. Kedua negara perlu terus memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan tren pariwisata pascapandemi, digitalisasi industri pariwisata, serta isu keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata.

Sebagai langkah ke depan, kerja sama ini dapat diperluas dengan mencakup aspek-aspek baru seperti pengembangan ekowisata, digitalisasi promosi pariwisata, serta kolaborasi dalam penyelenggaraan acara internasional. Dengan semakin meningkatnya kesadaran wisatawan terhadap pentingnya pariwisata berkelanjutan, kedua negara dapat menjadikan kerja sama ini sebagai peluang untuk memperkenalkan konsep pariwisata yang lebih ramah lingkungan dan berbasis komunitas. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam promosi dan pemasaran pariwisata dapat semakin diperkuat untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata Indonesia dan Kamboja di mata dunia.

Kesimpulannya, kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam sektor pariwisata selama periode 2022–2024 telah menunjukkan hasil yang positif dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan, penguatan konektivitas, serta pengembangan kapasitas SDM di sektor pariwisata. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi, langkah-langkah strategis yang telah diambil menunjukkan bahwa kerja sama ini memiliki prospek yang cerah di masa depan. Dengan terus

memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas wisata, diharapkan kerja sama ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di kancah global.

DAFTAR PUSTAKA

"42 BAB IV PEMBENTUKAN KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA"

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12083/8.BAB%20IV.pdf?isAllowed=y&sequence=8>.

"Indonesia – Kamboja Sepakati Kerja Sama Pariwisata untuk" 21 Jan. 2022,

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/indonesia-kamboja-sepakati-kerja-sama-pariwisata-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi>.

"Indonesia And Cambodia Agree To Awakening Post Pandemic" 27 Jun. 2022,

<https://kemlu.go.id/portal/en/read/3730/berita/indonesia-and-cambodia-agree-to-awakening-post-pandemic-tourism>.

"Indonesia: tourism as share of GDP - Statista." 21 Nov. 2023,

<https://www.statista.com/statistics/1150613/indonesia-tourism-gdp-direct-contribution-share/>.

"Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Phnom Penh ... - Kemlu." 6 Agu. 2023,

<https://kemlu.go.id/phnompenh/id/read/press-release-the-14th-indonesian-trade-and-tourism-promotion-ittp-strengthening-cooperation-through-collaboration-phnom-penh-4-6-august-2023/1561/important-information>.

"Kerjasama Indonesia-Kamboja dalam sektor pariwisata melalui" 30 Okt. 2022,

<http://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/view/2685>.

"View of KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DENGAN"

<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/4073/3281>.

("Supriono et al. "PROBLEM IDENTIFICATION OF FOREIGN TOURIST DISTRIBUTION IN INDONESIA." Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 67 (2017): 115-120.

Abdullah, Bachtiar. . Perdamaian Thailand-Kamboja Tergantul Parlemen.

<http://m.inilah.com/read/detail/1811122/perdamaian-thailand-kamboja-terganjal-parlemen>.

Akbar, Aulia . Era Baru Hubungan Thailand &

Kamboja.<http://international.okezone.com/read/2011/08/13/411/491577/era-baru-hubungan-thailand-kamboja>.

Akhmad, N. M., & Yuliati. (2022). Kerjasama Indonesia-Kamboja dalam sektor pariwisata melalui hubungan bilateral dan organisasi wilayah ASEAN Tahun 1955-2018. Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S), 2(10), 936-944.

- Armandhanu, Denny. 2011. Menlu RI Dorong Peran Mediasi Damai di PBB.
<http://wap.vivanews.com/news/read/248786-menlu-ri-dorong-peran-media-si-damai-di-pbb>.
- Astuti, Nur S. W. "Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Kota Magelang (Studi pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang)." Jurnal Paradigma Multidispliner, vol. 2, no. 3, 2021,
- Astuti, Nur S. W. "Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Kota Magelang (Studi pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang)." Jurnal Paradigma Multidispliner, vol. 2, no. 3
- Dampak Pariwisata Pada Perekonomian - Fakultas Ekonomi dan" 15 Mei. 2023,
<https://feb.umsu.ac.id/dampak-pariwisata-pada-perekonomian/>.
- FROM DUTCH MERCANTILISM TO LIBERALISM: INDONESIAN"
<https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39915>.
- Gordon, B., & Young, K. (1971). The Khmer Republic: That Was the Cambodia That Was. Asian Survey, 11, 26-40.
- ICJ. ICJ Judgement on Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Merits). 15 June 1962.
<http://www.icjci.org/docket/index.php?sum=284&code=ct&p1=3&p2=3&case=45&k=46&p3=5>
- Indonesia – Kamboja Sepakati Kerja Sama Pariwisata untuk" 21 Jan. 2022,
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/indonesia-kamboja-sepakati-kerja-sama-pariwisata-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi>.
- Indonesia Fasilitasi Thailand-Kamboja. 2011.
<http://internasional.kompas.com/read/2011/04/08/12564364/Indonesia.Fasilitasi.ThailandKamboja>.
- Irewati, Awani, dkk. Draft penelitian DIPA 2011. Sengketa wilayah perbatasan Thailand-Kamboja. Jakarta : P2P-LIPI
- Jurnal Pariwisata Indonesia." 30 Jun. 2023, <https://jurnal.stpsahidsurakarta.ac.id/>.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2022). Indonesia – Kamboja Sepakati Kerja Sama Pariwisata untuk Percepat Pemulihan Ekonomi.
- Melinda, Mona, (2019)"Permasalahan pengembangan potensi pariwisata." 2. Menanti Diplomasi Tingkat Tinggi Indonesia dalam Konflik Thailand-Kamboja. 2011.
<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/451-menantidiplomasi-tingkat-tinggi-indonesia-dalam-konflik-thailand-kamboja>.

Perkembangan Pariwisata Dunia - Direktori File UPI."

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/LIGA_SURYADANA/Perkembangan_Pariwisata_Dunia.pdf.

Prasad, M. (2017). Indonesia's Role in the Resolution of the Cambodian Problem.

Pratiwi, H., & Sukandar, R. (2024). Indonesia's strategy in ASEAN in handling the issues of human Trafficking in Cambodia. *Jurnal Mantik*.

Pratiwi, H., & Sukandar, R. (2024). Indonesia's strategy in ASEAN in handling the issues of human Trafficking in Cambodia. *Jurnal Mantik*. 316

Pratiwi, H., & Sukandar, R. (2024). Indonesia's strategy in ASEAN in handling the issues of human Trafficking in Cambodia. *Jurnal Mantik*. 317

Putra, T., Utomo, M.A, D. T. C., & Windiani, M.S, D. R. (2013). Strategi Indonesia Dalam Kepemimpinan ASEAN 2011 (Analisis Peranan Indonesia Sebagai Penengah Konflik Thailand-Kamboja Tahun 2008-2011). *Journal of Politic and Government Studies*, 0, 1-9.

Sari, D. P. (2023). Kamboja dan Integrasi Ekonomi Regional: Peluang di Sektor Pariwisata. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(1), 15-25.

Sari, D. P. (2023). Kamboja dan Integrasi Ekonomi Regional: Peluang di Sektor Pariwisata. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(1), 15-25

Sudrajat, A., Widiyanta, D., Murdiyastomo, H., Ikaningtiyas, D., Huda, M., & Safar, J. (2020). THE ROLE OF INDONESIA IN CREATING PEACE IN CAMBODIA: 1979-1992. , 7, 702-706.

Tantangan Pariwisata yang Harus Segera Dituntaskan di Akhir Tahun 2024. (2024,

November 19). *detikTravel*. Retrieved December 2, 2024, from

<https://travel.detik.com/travel-news/d-7645862/5-tantangan-pariwisata-yang-harus-segera-dituntaskan-di-akhir-tahun-2024>

Kompasiana. (2023). *Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Kamboja, dari Pariwisata hingga Investasi*.

B. Berita Acara Bimbingan

10/05, 20:07 PM

Universitas Budi Luhur & Akademi Sekretari Budi Luhur
Kartu Bimbingan Mahasiswa

N I M : 3040500546
NAMA : Muhammad Ehsan
Dosen Pendamping : Angga Puspitasari, M.Si
Judul Skripsi : UPAYA KERJASAMA INDONESIA DAN KAMBOJA DALAM SEKTOR
PARIWISATA 2023 - 2024

No	Tanggal	Materi
1	01-10-2024	Pengajuan Judul
2	11-11-2024	Revisi Bab 2 dan Bimbingan Bab 3
3	23-11-2024	Revisi Bab 3
4	03-12-2024	Bimbingan Bab 4
5	12-12-2024	Revisi Bab 4
6	21-12-2024	Revisi Bab 4
7	18-01-2025	Bimbingan Bab 5 dan Pelengkap Lainnya
8	24-01-2025	Disediakan untuk daftar sidang

Mahasiswa diatas melakukan bimbingan dengan jumlah materi yang telah mencukupi untuk disidangkan.

Mahasiswa



(Muhammad Ehsan)